

# MEMPERCEPAT PENERAPAN PENDEKATAN LANSKAP DAN YURISDIKSI

Tantangan Global dan Rekomendasi Kebijakan

November 2023



# Kata Pengantar

**Saat ini, berbagai masalah lingkungan yang belum pernah muncul sebelumnya makin terkait dengan perkembangan sosial ekonomi. Kondisi ini kian mempertegas adanya urgensi untuk mengadopsi strategi yang inovatif dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan. Persoalan rumit seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kesenjangan sosial makin jelas menunjukkan bahwa pendekatan parsial dan intervensi yang terpisah-pisah hanya mampu menciptakan solusi yang terbatas.**

Tindakan mendesak yang diperlukan saat ini adalah mencari dan menerapkan solusi holistik, terpadu, dan terukur yang mencakup perusahaan, sektor, maupun yurisdiksi. Dalam hal ini, pendekatan lanskap dan pendekatan yurisdiksi (PL/PY) hadir sebagai angin segar yang menjanjikan suatu cara menuju masa depan yang berketahanan dan sejahtera.

PL/PY menuntut perubahan mendasar dalam memandang dan mengatasi tantangan lingkungan dan sosial ekonomi. Pada intinya, pendekatan ini mendorong pemaduan upaya di lanskap geografis dan wilayah yurisdiksi. Dengan menyadari bahwa sistem ekologi dan manusia saling berkaitan, PL/PY menawarkan peluang unik untuk menyeimbangkan aspirasi pembangunan dengan pentingnya konservasi dan inklusi sosial.

Berbagai manfaat yang diperoleh dari penerapan PL/PY antara lain mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mendorong pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan mengurangi tekanan terhadap ekosistem rentan. Selain itu, PL/PY dapat memberdayakan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat, serta meningkatkan proses pengambilan keputusan partisipatif yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak. Kedua pendekatan ini juga berpotensi membuka peluang baru untuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), menarik investasi, dan memfasilitasi peningkatan keberhasilan intervensi.

Ringkasan kebijakan ini menyoroti tantangan dalam lingkup kebijakan internasional, nasional, dan daerah untuk memperoleh manfaat dari PL/PY serta mempercepat perancangan dan penerapannya. Dokumen ini secara khusus berfokus pada studi kasus regional di Brasil dan Indonesia yang merupakan negara dengan angka tertinggi dalam pengungkapan inisiatif PL/PY melalui platform pengungkapan CDP. Selain itu, ringkasan kebijakan ini juga menguraikan tindakan kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi kendala dan tantangan yang dapat menghambat percepatan penerapan kedua pendekatan ini.

Ringkasan kebijakan ini mengajak pembuat kebijakan di semua tingkat untuk, termasuk di antaranya, mendukung pengakuan PL/PY secara tegas dan resmi, mengembangkan kerangka kebijakan terpadu yang memfasilitasi penerapan tujuan keberlanjutan jangka panjang berbagai lanskap dan wilayah yurisdiksi, mempercepat perancangan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dan insentif keuangan yang penting untuk kesinambungan PL/PY, dan membangun platform monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Meskipun akan ada hambatan dalam transformasi menuju pendekatan yang lebih holistik dan terpadu, tetapi potensi manfaat yang akan diperoleh jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi. Saat ini kita menghadapi momen penting dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan dan inklusif, dan PL/PY menawarkan langkah ke depan yang menjanjikan. Melalui penyelarasan kebijakan dengan paradigma yang berwawasan ke depan, kita dapat memanfaatkan kekuatan tindakan bersama, sehingga mendorong perubahan positif yang menembus batas dan menyelamatkan bumi untuk generasi mendatang.



**Thomas Maddox**

Direktur, Hutan dan Lahan, CDP



# Daftar Isi

<b>02</b>	<b>Kata Pengantar</b>
<b>05</b>	<b>Tentang laporan ini</b>
<b>07</b>	<b>Konteks Internasional</b>
08	Posisi PL/PY dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan
11	Sejauh mana kebijakan memengaruhi adopsi dan perancangan PL/PY
12	Kedudukan PL/PY dalam inisiatif transnasional dan cara inisiatif ini memengaruhi pengadopsian dan perancangan PL/PY
<b>16</b>	<b>Studi Kasus Regional di Indonesia dan Brasil</b>
18	PL/PY dalam cakupan kebijakan nasional
24	Kerangka kebijakan daerah dan program PL/PY
<b>35</b>	<b>Tantangan Pengadopsian PL/PY</b>
<b>40</b>	<b>Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan</b>
<b>44</b>	<b>Lampiran</b>
45	Lampiran I: Referensi terkait PL/PY dari perjanjian internasional mengenai lingkungan
47	Lampiran II: Mekanisme yang terdapat dalam perjanjian lingkungan internasional memengaruhi adopsi PL/PY
49	Lampiran III: Inisiatif transnasional yang dipimpin oleh organisasi internasional, regional, atau nasional, dan pemerintah yang membina dan membantu perancangan dan pelaksanaan PL/PY

## Pemberitahuan Penting

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan mencantumkan CDP. Namun hal tersebut tidak termasuk untuk mengemas ulang atau menjual kembali data apapun yang dilaporkan ke CDP maupun penulis yang berkontribusi dalam laporan ini. Jika Anda bermaksud mengemas ulang atau menjual kembali isi laporan ini, Anda perlu mendapatkan izin tertulis dari CDP terlebih dahulu. CDP telah menyusun data dan analisis dalam laporan ini berdasarkan respon terhadap permintaan informasi CDP tahun 2022. Tidak ada pernyataan atau jaminan (tersurat maupun tersirat) yang diberikan oleh CDP atas keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang terkandung dalam laporan ini. Anda tidak dapat bertindak berdasarkan informasi yang terkandung dalam publikasi ini tanpa memiliki saran profesional yang spesifik. Sejauh diizinkan oleh undang-undang, CDP tidak menerima atau menanggung beban, tanggung jawab, kewajiban atas konsekuensi apapun berupa tindakan atau keputusan apapun oleh satu atau banyak orang berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi dan pandangan yang diungkapkan oleh CDP di sini didasarkan pada penilaian mereka pada saat respon diberikan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan karena faktor ekonomi, politik, industri, dan spesifik perusahaan. Komentar tamu yang disertakan dalam laporan ini mencerminkan pandangan mereka kepada masing-masing penulis; pernyataan mereka bukanlah suatu dukungan terhadap mereka. CDP, firma atau perusahaan anggota afiliasinya, atau masing-masing pemegang saham, anggota, mitra, prinsipal, direktur, pejabat dan/atau karyawan, dapat menduduki jabatan pada sekuritas perusahaan yang dibicarakan di sini. Sekuritas dari perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini mungkin tidak memenuhi syarat dijual di beberapa negara bagian atau beberapa negara, juga tidak cocok untuk semua jenis investor; nilainya dan pendapatan yang dihasilkannya dapat berfluktuasi dan/atau terkena dampak buruk oleh nilai tukar. 'CDP' mengacu pada CDP North America, Inc, sebuah organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)3 di AS dan CDP Worldwide, nomor amal terdaftar 1122330 dan perusahaan yang dibatasi oleh jaminan, terdaftar di Inggris nomor 05013650.

# Tentang laporan ini

**Pendekatan lanskap dan pendekatan yurisdiksi (*landscape and jurisdictional approaches* atau PL/PY) menyajikan kerangka pengelolaan yang dapat memadukan tindakan beberapa pemangku kepentingan ke dalam suatu lanskap atau yurisdiksi (biasanya di tingkat daerah) untuk mengatasi berbagai faktor penyebab deforestasi dan degradasi ekosistem yang sistemis yang tidak dapat diatasi secara memadai di tingkat proyek atau rantai pasok semata.**

Pendekatan ini semakin banyak mendapatkan dukungan dari pelaku publik dan swasta sebagai bagian dari strategi pengelolaan yang holistik, yang menyelaraskan tujuan berbagai pemangku kepentingan, jenis pemanfaatan lahan, fungsi ekologi, dan pembangunan dalam satu visi keberlanjutan yang sama dan sesuai konteksnya. PL/PY memiliki potensi untuk memaksimalkan kontribusi sektor swasta terhadap tujuan lingkungan dan memberikan berbagai manfaat sosial ekologi dan ekonomi, termasuk:



**Ketahanan terhadap perubahan iklim**



**Mata pencaharian dan kondisi kesejahteraan yang lebih baik bagi manusia**



**Adaptasi dan mitigasi**



**Pemeliharaan dan peningkatan jasa ekosistem**

Untuk sektor swasta, PL/PY dapat membantu perusahaan memenuhi komitmen tanpa deforestasi dan komitmen lainnya terkait alam, sekaligus menyelaraskan tujuannya dengan kebijakan lingkungan pemerintah daerah, serta memberikan peluang untuk mengidentifikasi potensi risiko rantai pasok dan meningkatkan upaya kemamputelusuran, pemantauan, dan verifikasi. Tindakan bersama untuk menerapkan kedua pendekatan ini dapat memberikan manfaat kolektif jangka panjang, mendorong dampak dalam skala besar, serta membangun ekosistem, masyarakat, dan pelaku usaha yang berketahanan<sup>1</sup>. Meskipun ada peningkatan, data CDP menunjukkan bahwa partisipasi perusahaan dalam PL/PY masih lemah.



**Aksi kolektif untuk LA/JA dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak, mendorong dampak dalam skala besar, dan membangun ekosistem, komunitas, dan bisnis yang tangguh.**

<sup>1</sup> [Collective action: Corporate engagement in landscape and jurisdictional approaches](#)

Memiliki ekosistem kebijakan yang mendukung adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menerapkan aksi lingkungan yang efektif dan mendorong KPBU dalam skala besar. Hal ini terutama berlaku bagi pendekatan baru seperti PL/PY yang mengandalkan peraturan tata kelola di berbagai tingkat, itikad yang kuat dari pemerintah, struktur/kerangka resmi, dan komitmen guna mendukung dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, negosiasi, dan kesepakatan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan di tingkat global, nasional, dan daerah saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain yang harus diketahui guna mengidentifikasi berbagai persoalan, termasuk cara pemerintah di berbagai tingkatan, mampu mendorong kondisi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan program PL/PY serta meningkatkan partisipasi perusahaan dalam kegiatan dan program tersebut.



Dalam ringkasan kebijakan ini, CDP akan memberikan wawasan mengenai pengaruh kebijakan lingkungan internasional dan inisiatif transnasional dalam rancangan dan pelaksanaan PL/PY, dengan menilai:

- ▼ Pembahasan PL/PY dan konsep terkait dalam perjanjian lingkungan internasional; dan
- ▼ Pengaruh inisiatif berbagai pemangku kepentingan transnasional dalam membentuk rancangan dan pelaksanaan PL/PY.

CDP juga akan memberikan wawasan mengenai cara kebijakan nasional dan daerah memengaruhi penerapan dan pelaksanaan program PL/PY dengan menyajikan studi kasus dari Brasil dan Indonesia yang menyoroti:

- ▼ Kebijakan lingkungan yang dapat memfasilitasi penerapan PL/PY di kedua negara ini, dengan menyoroti kemungkinan pelibatan perusahaan dalam PL/PY; dan
- ▼ Tantangan dan peluang yang muncul dari program PL/PY yang tengah dirancang dan dilaksanakan di wilayah yurisdiksi daerah di Brasil dan Indonesia.

**Berdasarkan wawasan di atas, ringkasan ini menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai cara mempercepat penerapan PL/PY.**

# Konteks Internasional



# Konteks Internasional

**Perjanjian internasional mengenai lingkungan menetapkan prinsip, norma, aturan, dan (idealnya) target yang memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaruh tersebut muncul dalam berbagai cara dan intensitas, bergantung persoalan yang dibahas dalam perjanjian tersebut, aspek ekonomi politik pada masalah yang dihadapi, dan cara setiap negara melakukan atau tidak melakukan internalisasi ketentuan dalam perjanjian tersebut, serta beberapa variabel lainnya. Oleh karena itu, dengan menganalisis cara perjanjian internasional mengenai lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan tertentu dapat menunjukkan alasan dan cara pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap masalah lingkungan yang diidentifikasi dan hendak diatasi.**

Selain perjanjian lingkungan, inisiatif berbagai pemangku kepentingan transnasional yang ditujukan untuk mengatasi aspek yang lebih spesifik dari persoalan lingkungan yang lebih luas sekaligus menyediakan pengetahuan, panduan, norma, dan bentuk dukungan lainnya kepada pemangku kepentingan, juga akan memengaruhi perancangan dan pelaksanaan kebijakan. Karena fokus tematiknya yang lebih spesifik, terkadang inisiatif yang dapat dilihat di bawah ini akan memberikan pengaruh yang lebih langsung terhadap bentuk kebijakan yang diambil.

## Posisi PL/PY dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan

**Secara keseluruhan, belum ada referensi yang jelas untuk PL/PY dalam perjanjian dan deklarasi internasional mengenai lingkungan (lihat Lampiran I untuk penilaian terperinci terhadap perjanjian dan deklarasi tersebut).** Meski demikian, terdapat pengakuan yang lebih luas terhadap pendekatan kolaboratif berskala besar lainnya yang memiliki kemiripan konsep dengan PL/PY, seperti Adaptasi Berbasis Ekosistem (*Ecosystem-based Adaptation/EbA*)<sup>2</sup>, *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation + (REDD+)* Yurisdiksi, dan Pengelolaan Lanskap Terpadu, dimana hanya persyaratan yang sangat umum mengenai partisipasi dan dukungan terhadap KPBK yang ditemukan.

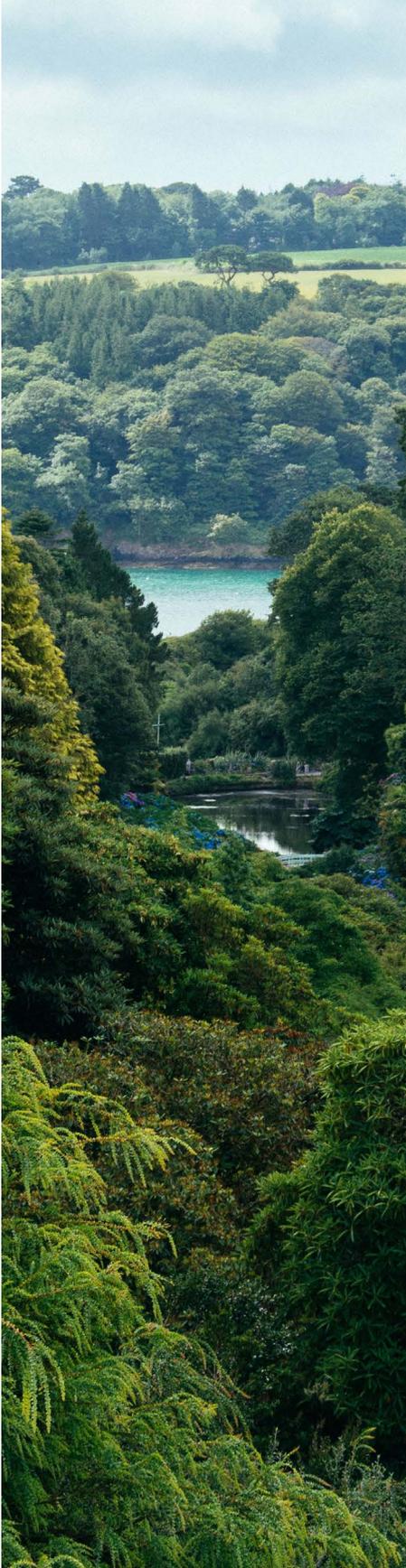
Meskipun tidak ada pengakuan yang tegas dan resmi terhadap PL/PY dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan, referensi terhadap konsep serupa menunjukkan bahwa PL/PY bermanfaat untuk mencapai keberhasilan pencapaian berbagai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

**Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (*UN Convention on Biological Diversity-CBD*)** mendorong pendekatan ekosistem sebagai kerangka pelaksanaan utama untuk mencapai konvensi ini. Pendekatan ekosistem lebih menekankan ‘pengelolaan lahan, air, dan sumber daya biotik secara terpadu yang mendorong konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan secara adil’<sup>3</sup> yang berbasis ilmu ekologi. Meskipun

**PL/PY  
bermanfaat  
untuk mencapai  
keberhasilan  
pencapaian  
berbagai tujuan  
yang ditetapkan  
dalam perjanjian  
tersebut.**

<sup>2</sup> Berdasarkan IUCN, EbA “memanfaatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/ecosystem-based-adaptation>.

<sup>3</sup> [Pendekatan Ekosistem\(cbd.int\)](https://www.cbd.int/strategy)



tidak menyebutkan PL/PY secara tegas, **Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal CBD** yang disetujui baru-baru ini berkomitmen untuk berupaya mencapai beberapa target tertentu<sup>4</sup> melalui konservasi berbasis kawasan yang diintegrasikan ke dalam lanskap yang lebih luas, dengan menerapkan pendekatan berbasis ekosistem dan memprioritaskan keanekaragaman hayati di semua tingkat pemerintahan dan sektor perekonomian, termasuk sektor swasta.

**Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC*)** secara khusus menyoroti negosiasi mengenai mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang dijabarkan dalam Pasal 5 Persetujuan Paris. REDD+ dapat dilaksanakan melalui pendekatan yurisdiksi (REDD+ Yurisdiksi atau JREDD+). Dalam hal ini, JREDD+ berpotensi mempermudah pengelolaan lanskap terpadu dan bersinggungan dengan beberapa prinsip pendekatan lanskap<sup>5</sup>, misalnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan secara adil dalam proses pengambilan keputusan atau klarifikasi hak dan kewajiban antara para pemangku kepentingan tersebut.

Sementara itu, bagian pendahuluan **Konvensi PBB untuk Penanggulangan Penggurunan (*The United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD*)** beserta Kerangka Strategis 2018-2030 secara tegas menyebutkan perlunya strategi terpadu untuk mencapai Netralitas Degradasi Lahan. Hal ini dapat ditemukan juga secara tersirat dalam tujuan strategisnya untuk mendorong pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Baik **Deklarasi New York tentang Hutan (*New York Declaration on Forests-NYDF*)** yang terbaru maupun **Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan (Deklarasi Glasgow)** bertujuan menghentikan deforestasi global selambatnya pada tahun 2030. Namun, kedua deklarasi tersebut tidak menyebutkan PL/PY secara jelas ataupun tersirat dalam tujuannya. NYDF secara tersirat mendukung JREDD+ dengan menyatakan bahwa yurisdiksi (daerah/wilayah beserta otoritas pemerintahannya) harus mendapatkan apresiasi karena telah mengurangi emisi hutan, “khususnya melalui kebijakan publik untuk meningkatkan kompensasi finansial untuk penurunan emisi terverifikasi dan pembelian komoditas yang dilakukan sektor swasta”. Sebagai perbandingan dengan NYDF, Deklarasi Glasgow dalam bagian pendahuluan menyoroti bahwa untuk mendorong pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, diperlukan pelibatan sistem yang ‘saling terhubung’ dan ‘saling bergantung’. Namun, deklarasi ini tidak menyebutkan PL/PY sebagai kerangka terpadu untuk melibatkan sistem yang saling terhubung tersebut.

4 Target 3 – Melestarikan 30% wilayah daratan dan lautan di dunia; dan Target 8 – Meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi melalui pendekatan berbasis ekosistem.

5 [Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses |PNAS](#)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) – Agenda 2030 menyatakan

**dapat dilihat secara tersirat bahwa sebagian besar tujuan ini saling terhubung, dan pendekatan lanskap kemungkinan besar akan menjadi kerangka yang paling sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan atau setidaknya target yang ditetapkan dapat mencapai hasil yang positif jika ditangani melalui sudut pandang lanskap.<sup>6</sup>**

Sistem sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dibahas dalam SDG ini semuanya saling berkaitan, dan dengan demikian, solusi yang terpadu sangat penting untuk pencapaian SDG.



<sup>6</sup> Pendekatan lanskap terintegrasi untuk mengelola isu lingkungan dan sosial dalam topik: pembelajaran dari masa lalu sebagai panduan untuk masa depan - Reed - 2016 - Global Change Biology - Wiley Online Library

## Tingkat pengaruh berbagai kebijakan ini terhadap penerapan dan perancangan PL/PY

Meskipun tidak ada pengakuan yang tegas terhadap PL/PY, perjanjian internasional mengenai lingkungan berpotensi memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap penerapan dan perancangan PL/PY melalui (lihat Lampiran 2):



**Pengembangan kemampuan**



**Pendanaan**



**Bantuan ilmiah dan teknis**



**Panduan normatif**

Potensi pengaruh secara tidak langsung tersebut ditunjukkan melalui penggunaan konsep terkait PL/PY, seperti pengelolaan terpadu, pendekatan ekosistem, Adaptasi berbasis Ekosistem (*Ecosystem based Adaptation-EbA*), atau REDD+.

Terkait **pengembangan kemampuan**, CBD, UNFCCC, dan SDG telah mengembangkan pusat pengetahuan yang menyediakan informasi dan alat pembelajaran mengenai pendekatan lanskap, EbA, pengelolaan lanskap terpadu, REDD+, dan pendekatan ekosistem bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan. Informasi ini meliputi praktik terbaik, pendekatan pelaksanaan, lokakarya, atau panduan dengan tujuan mengembangkan pemahaman mengenai pendekatan terpadu untuk pengelolaan pemanfaatan lahan.

Mekanisme lainnya dapat dilihat dalam **bantuan ilmiah dan teknis**. Antarmuka Sains-Kebijakan (*Science-Policy Interface/SPI*) UNCCD mengembangkan bukti berbasis sains mengenai pengelolaan lanskap terpadu (*Integrated Landscape Management/ILM*) dan perencanaan pemanfaatan lahan terpadu seperti yang diminta oleh Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties-COP*). Platform Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-IPBES*) ataupun Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC*) belum pernah menerapkan upaya serupa terkait hal ini. Oleh karena itu, UNFCCC mendorong penerapan JREDD+ secara luas melalui penilaian teknis program REDD+ dan verifikasi kredit karbon.

CBD, UNCCD, dan UNFCCC membuka peluang pendanaan untuk mendukung kegiatan yang serupa dengan PL/PY, yakni melalui Dana Iklim Hijau (*Green Climate Fund-GCF*) dan Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environmental Facility-GEF*). Sebagai contoh, kredit karbon terverifikasi JREDD+ UNFCCC dibeli oleh GCF. Baru-baru ini, pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti warga negara perorangan dan perusahaan swasta, juga dapat membeli kredit karbon REDD+ yang diverifikasi



**CBD, UNCCD, dan UNFCCC membuka peluang pendanaan untuk mendukung kegiatan yang serupa dengan PL/PY, yakni melalui Dana Iklim Hijau (*Green Climate Fund-GCF*) dan Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environmental Facility-GEF*).**



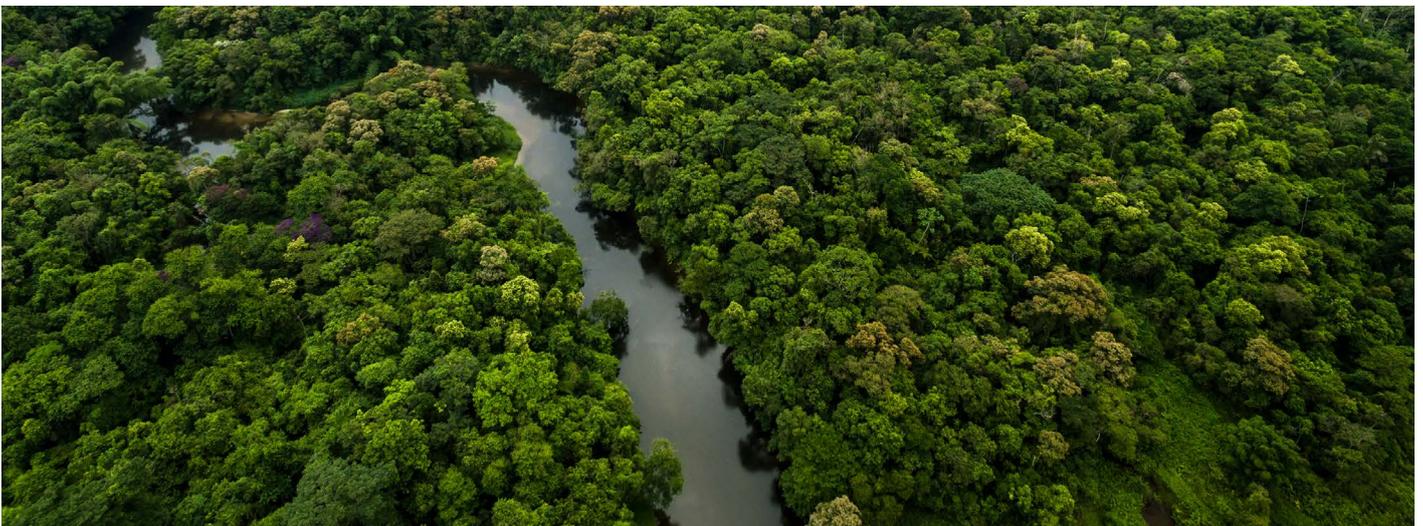
## Inisiatif transnasional berkontribusi pada desain dan implementasi PL/PY.

oleh UNFCC di platform REDD+ yang dikembangkan dan dikoordinasi oleh Coalition for Rainforest Nations. Platform baru ini dapat dianggap sebagai lokapasar untuk kredit karbon terverifikasi UNFCC dan memfasilitasi struktur insentif ekonomi untuk mendorong PL/PY. Meskipun pada awalnya hanya GCF, Jerman, Norwegia, dan Inggris yang melakukan transaksi kredit karbon terverifikasi UNFCCC, saat ini siapa pun dapat membeli kredit di lokapasar publik yang dikoordinasikan oleh organisasi masyarakat sipil.

Terakhir, **panduan normatif** mengenai perancangan dan pelaksanaan pendekatan ekosistem disediakan oleh CBD, sementara UNFCCC menyediakan panduan normatif mengenai perancangan dan pelaksanaan JREDD+. Tidak disebutkannya PL/PY dengan jelas dalam panduan normatif berkaitan dengan fakta bahwa pendekatan ini tidak mendapatkan pengakuan resmi dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan. Namun, panduan normatif yang secara khusus tidak berfokus pada PL/PY yang disediakan oleh perjanjian tersebut benar-benar memengaruhi penerapan pendekatan ini. Sebagaimana dapat dilihat di bawah ini, komitmen Brasil dan Indonesia terhadap Persetujuan Paris membuat keduanya menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi dari sektor pertanian, kehutanan, dan pemanfaatan lahan lainnya (*Agriculture, Forests and Other Land Use-AFOLU*), dan kedua negara ini juga telah menerapkan PL/PY untuk mencapai Kontribusi Nasional yang Diniatkan (*Nationally Determined Contributions-NDC*) dalam Persetujuan Paris.

## Kedudukan PL/PY dalam inisiatif transnasional dan pengaruh inisiatif ini terhadap penerapan dan perancangan PL/PY

Dibandingkan dengan kesepakatan internasional, inisiatif transnasional yang dipimpin oleh pemangku kepentingan lain tidak hanya **mengacu pada PL/PY secara langsung, tetapi juga berkontribusi dalam perancangan dan pelaksanaannya, dan sering kali didorong oleh, atau terintegrasi kuat dengan sektor swasta (lihat Lampiran 3).**



Secara keseluruhan, lebih dari 25 inisiatif teridentifikasi secara jelas membantu dan mendorong perancangan dan pelaksanaan PL/PY. Berbagai inisiatif ini mengembangkan panduan dan verifikasi untuk pelaksanaan PL/PY, mendanai perancangan dan pelaksanaan PL/PY, memberikan ruang kolaborasi, serta mengumpulkan dan menyediakan data PL/PY. Untuk itu, peran penting inisiatif yang membantu perancangan dan pelaksanaan JREDD+ dari segi teknis dan keuangan patut disoroti. Dari semua inisiatif tersebut, enam inisiatif yang disajikan di Tabel 1 berikut dianggap sangat relevan untuk mendorong PL/PY berdasarkan konsultasi internal oleh tim CDP yang menangani PL/PY. Lihat Lampiran 3 untuk daftar inisiatif lainnya.

**Tabel 1: Inisiatif terkait yang membantu perkembangan perancangan dan pelaksanaan PL/PY**

Nama inisiatif	Pemangku kepentingan	Bentuk dukungan inisiatif dalam perancangan dan penerapan PL/PY	Keterlibatan sektor swasta
<b>Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (<i>The Governors' Climate and Forests Task Force - GCF-TF</i>)</b>	Anggota pendirinya mencakup negara bagian California, Illinois (AS), Amapá, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Acre (Brasil), dan Aceh dan Papua (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah</li> <li>▼ Menarik pendanaan dari donor internasional</li> <li>▼ Menyusun strategi dan rencana investasi yang ditargetkan untuk JREDD+, serta pembangunan rendah emisi dengan mitra masyarakat sipil</li> </ul>	Mendorong KPBU
<b>Koalisi <i>Lowering Emissions by Accelerating Forest finance (LEAF)</i></b>	NICFI (Norwegia), Inggris, AS, dan berbagai perusahaan, seperti Amazon, Bayer, Unilever, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Dana untuk REDD+, dengan mendanai upaya perlindungan hutan tropis skala besar di seluruh negara atau yurisdiksi yang besar</li> <li>▼ Pertama kalinya memfasilitasi partisipasi sektor swasta dalam JREDD+</li> </ul>	Inisiatif KPBU
<b><u>Forest Positive Coalition of Action</u></b>	<u>Consumer Goods Forum (CGF)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Peningkatan kapasitas</li> <li>▼ Penyusunan strategi kolaboratif untuk lanskap produksi berkelanjutan</li> </ul>	Dipimpin sektor swasta
<b><u>Tindakan perusahaan yang efektif di tingkat lanskap dan yurisdiksi: panduan praktis</u></b>	<u>International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Memberikan panduan dan verifikasi aksi di tingkat lanskap</li> <li>▼ Memandu berbagai praktik untuk mengarahkan cara agar perusahaan dapat mendukung dan berinvestasi di PL/PY dan mengklaim kontribusinya secara transparan dan kredibel</li> </ul>	Sektor swasta sebagai satu target utama
<b><u>LandScale</u></b>	Rainforest Alliance, Verra, dan Conservation International	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Mendorong pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi yang andal mengenai keberlanjutan lanskap</li> <li>▼ Memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di lanskap tertentu dengan beragam inisiatif lanskap</li> </ul>	Sektor swasta sebagai satu target utama

**Gugus Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim** (*Governors' Climate and Forests Task Force - GCF-TF*) adalah suatu **ruang kolaborasi yang memfasilitasi pemimpin daerah** untuk mengurangi deforestasi melalui pendekatan yurisdiksi, dengan mendorong tata kelola lingkungan yang baik, pembiayaan hijau, dan perlindungan hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, serta meningkatkan upaya pembangunan rendah emisi. GCF-TF menarik pendanaan dari donor internasional yang sudah biasa memberikan dukungan untuk negara bagian dan provinsi guna **menyusun strategi dan rencana investasi yang ditargetkan untuk JREDD+ dan pembangunan rendah emisi yang bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil**. Dari tahun 2017 hingga 2020, ada 35 negara bagian dan provinsi berhutan tropis anggota GCF-TF yang telah menyusun dan memperbarui strategi dan rencana investasi tersebut. Berdasarkan hal ini, Pendanaan Inovasi tersebut saat ini **mendanai inisiatif yurisdiksi strategis yang dikembangkan**.

**Koalisi Lowering Emissions by Accelerating Forest finance** (*Lowering Emissions by Accelerating Forests finance- LEAF*) merupakan contoh lain **lembaga pendanaan baru untuk JREDD+**. Koalisi LEAF adalah inisiatif Pemerintah dan pihak swasta, memfasilitasi sektor swasta yang baru pertama kali berpartisipasi dalam JREDD+. Tujuan koalisi ini adalah menghentikan deforestasi dengan membiayai upaya perlindungan hutan tropis skala besar di seluruh negeri atau wilayah yurisdiksi yang luas melalui program yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama, termasuk Masyarakat Adat dan masyarakat setempat. Hingga tahun 2021, koalisi ini mengalirkan dana sebesar 1 miliar dolar AS.

**Forest Positive Coalition of Action** adalah sektor swasta yang dibentuk di bawah Forum Barang Konsumen (*Consumer Good Forum-CGF*) untuk **menyelenggarakan program pengembangan kemampuan serta penyusunan strategi kolaboratif untuk lanskap produksi berkelanjutan**. Koalisi ini dipimpin oleh 21 perusahaan dengan nilai pasar kolektif sekitar 2 triliun dolar AS, yang bertujuan meningkatkan tindakan bersama dan mempercepat upaya sistemis untuk menghentikan deforestasi, degradasi hutan, dan konversi dari rantai pasok komoditas utama, sekaligus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi, dan restorasi. Koalisi ini bertujuan untuk memanfaatkan PL/PY agar memberikan dampak lingkungan dan sosial yang positif, termasuk konservasi, restorasi, dan peningkatan mata pencaharian masyarakat setempat, tidak hanya di rantai pasoknya tetapi juga untuk skala besar dengan berkolaborasi dan menciptakan inovasi bersama pemangku kepentingan lainnya.

**LandScale** adalah upaya kolaboratif yang diprakarsai oleh beberapa NGO pada tahun 2019 untuk mendorong peningkatan skala besar dengan **memberdayakan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, agar menghasilkan dan menyampaikan informasi yang andal mengenai keberlanjutan lanskap**. LandScale menawarkan pendekatan terpandu untuk menilai kinerja lanskap melalui platform digital. LandScale dirancang untuk menyajikan data dan wawasan yang diperlukan untuk menghubungkan para berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di lanskap tertentu dengan inisiatif lanskap. Selain itu, LandScale menawarkan validasi terhadap klaim yang dapat diajukan oleh para pemangku kepentingan atas masing-

masing tonggak capaian penilaian, kinerja lanskap, dan kontribusinya pada kinerja lanskap.

Serupa dengan LandScale, upaya **ISEAL** terkait PL/PY bertujuan untuk **menyediakan panduan dan verifikasi tindakan tingkat lanskap** guna memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan yang dibuat oleh yurisdiksi, inisiatif lanskap, dan perusahaan yang membeli komoditas dari lanskap ini atau mendukung inisiatif lanskap. Sejauh ini, ISEAL telah mengembangkan serangkaian panduan praktis untuk mengarahkan perusahaan agar dapat mendukung dan berinvestasi dalam PL/PY dan mengklaim kontribusinya secara transparan dan kredibel.

**SourceUp** adalah platform untuk kolaborasi dalam keberlanjutan rantai pasok di tingkat lanskap. Platform ini menghubungkan pembeli komoditas dengan koalisi pemangku kepentingan di wilayah yang memproduksi komoditas ini, untuk **bersama-sama meningkatkan keberlanjutan di sepanjang rantai pasok melalui kolaborasi dan insentif pasar**. Melalui cara ini, SourceUp membantu perusahaan untuk memperoleh komoditas pertanian yang selaras dengan komitmen keberlanjutannya, sekaligus memfasilitasi inisiatif lanskap dan koalisi berbagai pemangku kepentingan yang sepakat dengan agenda keberlanjutan bersama.

## Kotak Informasi: PL/PY dan peraturan rantai pasok bebas deforestasi

Peraturan rantai pasok bebas deforestasi tengah digalakkan di Uni Eropa (UE), Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Karakteristik utama dalam peraturan uji tuntas ini mencakup pengembangan sistem kemamputelusuran menyeluruh yang memungkinkan entitas yang diatur dapat memastikan dan membuktikan bahwa komoditas pertanian yang diimpor dan/atau diekspor beserta produk turunannya tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi secara legal atau ilegal. Guna memastikan kepatuhan di daerah penghasil komoditas, maka harus dilakukan penghentian deforestasi, penegakan undang-undang lingkungan, pemberian dan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah secara jelas dan resmi, serta peningkatan aksesibilitas solusi kemamputelusuran untuk semua pelaku rantai pasok.

PL/PY dapat mendukung daerah penghasil komoditas dalam memenuhi persyaratan peraturan tertentu, seperti yang dijabarkan dalam peraturan UE tentang rantai pasok bebas deforestasi<sup>7</sup>. Pertama, PL/PY dapat memperkuat penegakan undang-undang nasional tentang lingkungan (yakni undang-undang tentang hutan, keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan, atau perubahan iklim), karena struktur tata kelola pendekatan ini mendorong adanya kolaborasi untuk mengidentifikasi penyebab deforestasi dan memitigasi risiko di antara pemangku kepentingan di lanskap lokal/regional. Kedua, PL/PY yang dipadukan dalam kemitraan dengan otoritas pemerintah dan perusahaan pembeli komoditas dapat mempercepat prosedur pendaftaran hak kepemilikan atas tanah bagi petani dan mendukung proses pendaftaran hak kepemilikan lahan ini secara finansial. Ketiga, PL/PY dapat memfasilitasi kolaborasi prakompetisi antara sesama perusahaan pembeli komoditas, ataupun antara perusahaan pembeli komoditas, petani skala kecil, dan tengkulak, yang pada akhirnya akan meningkatkan aksesibilitas data dan solusi kemamputelusuran.

<sup>7</sup> [European Deforestation Regulation: Key Opportunities and Risks - JA Hub \(jaresourcehub.org\)](#)

# Studi Kasus Regional di Brasil dan Indonesia

# 2

# Studi Kasus Regional di Brasil dan Indonesia

**Tanpa adanya panduan pasti dari perjanjian internasional mengenai lingkungan, perancangan dan pelaksanaan program PL/PY sangat dipengaruhi oleh inisiatif berbagai pemangku kepentingan transnasional. Pada akhirnya, program PL/PY dibentuk oleh karakteristik, tantangan, pemangku kepentingan nasional dan daerah, dan terutama keterkaitannya dengan kerangka kebijakan yang ada. Meskipun keterkaitan antara kerangka kebijakan nasional dan daerah dengan PL/PY akan bersifat spesifik untuk tiap yurisdiksi yang menerapkan PL/PY, terdapat beberapa kesamaan yang dapat ditemukan. Penilaian studi kasus dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang spesifik dan yang menjadi kesamaan tersebut. Dari studi kasus ini, akan dilakukan ekstrapolasi terhadap informasi penting mengenai cara menyempurnakan kebijakan dalam mendukung PL/PY secara global.**

Laporan ini menilai keterkaitan PL/PY dengan kerangka kebijakan nasional dan daerah, serta program-program PL/PY yang sedang dan baru berjalan di Brasil dan Indonesia. Meskipun PL/PY diterapkan di seluruh dunia, Brasil dan Indonesia dipilih sebagai contoh kasus karena dibandingkan dengan yurisdiksi lain, kedua negara ini memiliki inisiatif PL/PY paling banyak yang diungkapkan melalui CDP kuesioner pada tahun 2022 dibandingkan yurisdiksi lainnya<sup>8</sup>. Selain itu, keduanya merupakan negara megadiversitas dengan populasi tinggi, negara ekonomi berkembang dengan sektor pertanian penting yang berorientasi ekspor, serta memiliki tantangan sosial ekonomi serupa, termasuk ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Kedua negara ini juga memiliki sejarah panjang deforestasi yang didorong oleh komoditas dan (dalam kasus terbaik) beragam pencapaian dalam upaya melawan hilangnya hutan

Selanjutnya, bagian ini menyajikan berbagai kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang relevan untuk penerapan dan perancangan PL/PY, serta studi kasus program PL/PY daerah yang sedang dan baru berjalan serta berbagai kebijakan paling relevan yang mendasarinya. Perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, program PL/PY yang dijelaskan sejatinya telah ditetapkan secara resmi sebagai peraturan atau undang-undang.

<sup>8</sup> [Meeting nature goals: Landscape and Jurisdictional Approaches - CDP](#)

## PL/PY dalam cakupan kebijakan nasional



### Brasil

**Di Brasil, bioma Amazon, Cerrado, dan Caatinga mendominasi sebagian besar wilayah negara ini dan merupakan habitat bagi sejumlah besar keanekaragaman hayati dunia. Bioma-bioma ini dahulu terdampak oleh model ekonomi yang merugikan lingkungan dan mengganggu secara sosial, yang sebagian besar berbasis pola produksi pertanian yang tidak berkelanjutan. Secara historis, model ekonomi seperti ini menyebabkan laju deforestasi yang tinggi.**

Melalui berbagai kebijakan publik lintas sektor, Brasil telah menunjukkan kemampuannya dalam mengurangi laju deforestasi secara drastis, terutama di wilayah Amazon. Di wilayah ini, Brasil berhasil mengurangi laju deforestasi sebesar 72% antara tahun 2004 dan 2018<sup>9</sup> melalui pembentukan kawasan lindung, moratorium kedelai dan ternak, sistem pemantauan, mekanisme atur dan awasi (*command and control*)<sup>10</sup>, dan mekanisme pembatasan kredit untuk pemilik lahan yang secara ilegal melakukan deforestasi<sup>11</sup>. Beberapa kebijakan tersebut juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan dan mendukung penyusunan PL/PY sehingga menyediakan kerangka kebijakan nasional yang mendasari kebijakan daerah. Tabel 2 di bawah ini menyajikan ringkasan dari kebijakan tersebut dan kaitannya dengan agenda PL/PY di Brasil.

Komitmen internasional juga penting untuk agenda PL/PY di Brasil. Salah satu komitmen yang paling relevan adalah NDC dalam Persetujuan Paris. Brasil telah memperbarui NDC-nya pada tahun 2022-2023 dengan membuat perubahan berikut:



**Pemberantasan deforestasi ilegal sebelum tahun 2030**



**Pengurangan emisi GRK sebesar 53% antara tahun 2005 - 2030**



**Capaian jangka Panjang terbaru untuk mencapai netralitas emisi GRK pada tahun 2050**

<sup>9</sup> Ministério do Meio Ambiente, 2018. [Taxa de desmatamento na Amazônia Legal](#).

<sup>10</sup> "Instrumen atur dan awasi (*command and control*) menetapkan norma, aturan, prosedur, dan standar untuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dari kebijakan terkait, dengan sanksi hukum dan administratif terhadap ketidakpatuhan". LUTOSA, Maria Cecília J.; YOUNG, Carlos Eduardo F. *Política Ambiental*. Dalam: KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. *Economia Industrial: Fundamentos Teóricos e Práticos no Brasil*. 1 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Bab 24, halaman 569 – 590.

<sup>11</sup> Estadão, 2020. [Novo sistema do Inpe consolida liderança do Brasil](#)

Komitmen beserta kebijakan yang disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini adalah faktor utama yang mendorong agenda PL/PY, karena komitmen dan kebijakan ini menuntut para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai tindakan guna melindungi dan merestorasi hutan, selain meningkatkan kegiatan sosial dan lingkungan lainnya untuk jasa ekosistem yang bernilai ekonomi.

**Tabel 2: Kebijakan nasional yang mendukung PL/PY**

Tahun	Kebijakan	Bagaimana kebijakan ini mendukung PL/PY?
2012	<b>Undang-Undang Hutan (Forest Code)<sup>12</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat sistem CAR (Register Properti Perdesaan CAR)<sup>13</sup>.</li> <li>➤ Menetapkan (i) persentase minimum konservasi hutan untuk setiap bioma dan (ii) berbagai jenis kawasan lindung.</li> <li>➤ Membuat Rencana Kepatuhan Lingkungan (PRA) untuk mendukung dan mendorong pelestarian dan pemulihan lingkungan guna meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Hutan. Setiap Negara Bagian di Brasil juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan dan membuat program PRA yang spesifik guna meningkatkan kepatuhan terhadap hukum federal (Undang-Undang Hutan).</li> <li>➤ Membuat instrumen untuk memberikan kompensasi bagi perlindungan hutan, misalnya Kuota Cadangan Lingkungan (CRA): obligasi yang diterbitkan salah satunya untuk, memberikan ganti rugi terhadap properti perdesaan dengan tingkat pelestarian lingkungan yang lebih tinggi daripada yang diwajibkan oleh hukum<sup>14</sup>.</li> </ul>
2017	<b>Kebijakan Nasional untuk Pemulihan Vegetasi Asli (PROVEG dan PLANAVEG)</b>	<p>Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong proyek restorasi skala besar dengan memperkuat “kebijakan publik, insentif keuangan, pasar, praktik pertanian yang baik, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memulihkan vegetasi asli sekurangnya seluas 12 juta ha hingga tahun 2030”<sup>15</sup>.</p> <p>Insentif keuangan utama yang direncanakan antara lain (i) fasilitas kredit untuk perusahaan, produsen pedesaan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam restorasi hutan; (ii) donasi; (iii) obligasi hutan; dan (iv) keringanan pajak yang dikenakan pada input, produk, investasi keuangan, atau kegiatan terkait pemulihan vegetasi asli.</p>
2020	<b>Program Forest+</b>	<p>Program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk “membuat, mempromosikan, dan mengkonsolidasikan pasar untuk jasa lingkungan”<sup>16</sup>. Tujuan utamanya antara lain<sup>17</sup> (i) menandatangani kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional guna mendukung pembayaran untuk berbagai proyek jasa lingkungan, termasuk REDD+; (ii) mendorong terjalannya perjanjian di tingkat sektor untuk menciptakan permintaan jasa lingkungan; (iii) mendorong diterapkannya praktik metodologis untuk valuasi, verifikasi, validasi, sertifikasi, dan pemantauan jasa lingkungan; dan (iv) memberdayakan platform digital untuk pembayaran jasa lingkungan.</p>
2021	<b>Kebijakan Nasional mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan</b>	<p>Mendorong individu dan organisasi (misalnya, perusahaan, NGO, dan asosiasi) untuk memberikan apresiasi secara ekonomi, sosial, dan budaya terhadap berbagai jasa ekosistem melalui penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek swasta sukarela.</p>
---	<b>Fasilitas Kredit Hijau</b>	<p>PRONAF<sup>18</sup> - menyediakan fasilitas kredit guna mendorong produksi komoditas secara organik dan berkelanjutan sesuai agroekologi untuk produsen skala kecil dan menengah<sup>19</sup>.</p> <p>Program Pertanian Rendah Karbon (ABC Program)<sup>20</sup> - menyediakan berbagai fasilitas kredit terkait teknologi mitigasi perubahan iklim untuk pertanian. Beberapa program tersebut mendorong upaya: (i) pemulihan area terdeforestasi; (ii) Solusi Berbasis Alam (<i>Nature based Solutions/NbS</i>) dan produksi berkelanjutan bagi lingkungan; dan (iii) mitigasi perubahan iklim<sup>21</sup>. Menurut data resmi, program ini telah mengalirkan lebih dari 17 miliar Real Brasil ke berbagai proyek<sup>22</sup>.</p>

<sup>12</sup> [Undang-Undang Hutan](#).

<sup>13</sup> CAR adalah platform digital untuk mendaftarkan semua properti pedesaan guna memfasilitasi (i) perencanaan lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta (ii) pemantauan deforestasi. Registrasi ini harus disahkan oleh masing-masing Negara Bagian di Brasil untuk mengidentifikasi apakah properti pedesaan mematuhi undang-undang lingkungan (misalnya, apakah properti tersebut memiliki luas minimum hutan yang mencukupi atau apakah pengelolanya melindungi sempadan sungai dan lereng bukit).

<sup>14</sup> Getulio Vargas Foundation - Sao Paulo School of Economics. Bioeconomy Observatory. Environment as an opportunity: Market legal instruments (2022) [PORT].

<sup>15</sup> [Pemerintah Federal Brasil. Laporan. Kebijakan Nasional untuk Pemulihan Vegetasi Asli](#)

<sup>16</sup> [Kementerian Lingkungan Hidup Brasil](#).

<sup>17</sup> [Pemerintah Federal Brasil. Laporan. Pembayaran Nasional untuk Program Jasa Lingkungan \[FOREST+\]](#).

<sup>18</sup> [Kebijakan nasional untuk memperkuat pertanian keluarga](#).

<sup>19</sup> <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf>

<sup>20</sup> Program untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk konsolidasi ekonomi rendah karbon dalam pertanian

<sup>21</sup> [ABC Program](#).

<sup>22</sup> [Brazilian 2022 NDC to the Paris Agreement](#).

# 73%

## peningkatan laju deforestasi di Amazon antara tahun 2018 dan 2021

### Kegiatan yang memberikan tekanan kuat terhadap bioma Brasil yaitu:

Deforestasi ilegal untuk produksi komoditas



Penambangan ilegal



Perdagangan kayu secara ilegal



Perampasan lahan



Penangkapan ikan yang merusak



Namun, perubahan politik dalam negeri telah mengancam kesuksesan upaya ini pada tahun-tahun sebelumnya, dengan peningkatan laju deforestasi sebesar 73% di wilayah Amazon antara tahun 2018 dan 2021<sup>23</sup>. Meskipun ada kemajuan penting yang dihasilkan dari berbagai kebijakan yang tercantum dalam tabel di atas, masih terdapat beberapa tantangan utama baik di tingkat nasional maupun daerah yang harus diatasi Brasil guna mengurangi laju deforestasi untuk kesekian kalinya dan meningkatkan dampak PL/PY.

Tantangan utama yang pertama adalah perlunya meningkatkan kapasitas negara dan mekanisme atur dan awasi (*command and control*) untuk menjamin penegakan undang-undang lingkungan sebagaimana mestinya. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kemampuan negara untuk memantau, mencegah, dan mengatasi kegiatan ilegal yang merusak lingkungan telah menjadi masalah kronis di Brasil, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa contoh kegiatan yang memberikan tekanan kuat terhadap bioma Brasil yaitu penambangan ilegal, deforestasi ilegal untuk produksi komoditas, perdagangan kayu secara ilegal, perampasan lahan, dan penangkapan ikan yang merusak.

Tantangan utama lainnya yaitu tidak memadainya kebijakan ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan nilai hutan yang masih utuh, memfasilitasi akses pasar untuk produksi yang berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi pihak-pihak yang merawat alam beserta jasa lingkungannya. Berbagai kebijakan ini dapat dianggap sebagai cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan insentif untuk tindakan lingkungan (misalnya konservasi/restorasi hutan, pembuatan hasil hutan bernilai tambah tinggi, dan rantai pasok bebas deforestasi). Jika diterima dan diterapkan dengan baik, berbagai kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan produk keuangan dan solusi lingkungan yang penting untuk meningkatkan inisiatif PL/PY, membantu restorasi/konservasi hutan, serta meningkatkan ketahanan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemantauan negara terhadap kegiatan tersebut sangat penting agar proyek ini dapat berhasil dan menarik bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam jangka panjang.



## Indonesia

**Deforestasi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan penutupan lahan, salah satunya untuk perkebunan sawit. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2016, terjadi penurunan luas hutan yang hilang di negara ini. Kebijakan seperti penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, inisiatif untuk mencegah kebakaran di lahan gambut dan mendorong pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan serta pelibatan dalam kemitraan internasional telah diyakini membantu mengurangi laju deforestasi.**

Serupa dengan Brasil, komitmen dalam Persetujuan Paris menjadi kekuatan utama di balik pengakuan yang semakin meningkat terhadap pendekatan PL/PY di Indonesia. Indonesia menyampaikan NDC yang ditingkatkan (*Enhanced Nationally Determined Contributions* -ENDC) sebelum berlangsungnya Konferensi Para Pihak ke-27 (COP 27) PBB tentang Perubahan Iklim, yang lebih ambisius dengan target pengurangan emisi dari 29% menjadi 31,89% secara mandiri dan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional<sup>24</sup>. Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim tahun 2050 (*Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR 2050*)<sup>25</sup>. Strategi ini menetapkan target yang ambisius untuk mentransformasi sektor hutan dan pemanfaatan lahan lainnya (*Forest and Other Land Uses/FOLU*) dan sektor energi yang mewakili sumber utama emisi GRK di Indonesia. Melalui target skenario rendah karbon sesuai dengan Persetujuan Paris, Indonesia berencana mencapai puncak pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 dengan penyerapan karbon bersih di sektor FOLU. Penyerapan karbon bersih ini diharapkan mencapai 540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 dan memainkan peran kunci dalam komitmen emisi nol bersih Indonesia tahun 2060<sup>26</sup>. Pengurangan signifikan emisi FOLU yang diperlukan diharapkan terjadi melalui pengurangan deforestasi dan emisi terkait gambut serta peningkatan signifikan penyerapan karbon oleh hutan sekunder, penghijauan, dan reboisasi. Berbagai tujuan untuk pengurangan emisi FOLU ini terintegrasi dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna mencapai target pengembangan sektor lebih lanjut.

Selain mendukung kebijakan nasional, pencapaian LTS-LCCR 2050, termasuk tujuan penyerapan karbon bersih FOLU pada tahun 2030, memerlukan tindakan dari pemerintah daerah dan perusahaan<sup>27</sup>. Hal ini penting, mengingat hampir 5 juta ha hutan alam dapat ditemukan di area yang diizinkan untuk pembangunan perkebunan dan tujuan pengembangan<sup>28</sup>. Dalam konteks ini, alat utama untuk mencapai target pengurangan emisi FOLU adalah pelaksanaan kegiatan REDD+ di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan REDD+, pemerintah daerah dan pemegang konsesi swasta yang melestarikan hutan di luar persyaratan peraturan yang ada, berhak menerima pembayaran berbasis hasil berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 70/2017<sup>29</sup> dan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> <https://unfccc.int/documents/615084>

<sup>25</sup> [Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 \(Indonesia LTS-LCCR 2050\) \(unfccc.int\)](#)

<sup>26</sup> [Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 \(Indonesia LTS-LCCR 2050\) \(unfccc.int\)](#)

<sup>27</sup> [Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 \(Indonesia LTS-LCCR 2050\) \(unfccc.int\)](#)

<sup>28</sup> [Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 \(Indonesia LTS-LCCR 2050\) \(unfccc.int\)](#)

## Sektor hutan dan pemanfaatan lahan lainnya (FOLU) ditargetkan untuk berkontribusi sekitar

# 55%

## dari total target pengurangan emisi pada tahun 2030.



Selain itu, kepemimpinan pemerintah daerah juga diperlukan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) berdasarkan Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2019. Melalui RAN KSB, provinsi dan kabupaten yang menghasilkan minyak sawit diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk rencana aksi dan proses kerja sama multipemangku kepentingan guna meningkatkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Fokus utama dalam hal ini adalah mendorong pertumbuhan dan pengembangan perkebunan rakyat.

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan ENDC, dengan sektor FOLU yang berkontribusi sekitar 55% dari total target pengurangan emisi yang diproyeksikan pada tahun 2030 berdasarkan upaya penanggulangan 1 (skenario mitigasi tanpa syarat). Melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 168/2022, Pemerintah juga menetapkan Rencana Operasional Penyerapan Karbon Bersih FOLU tahun 2030. Untuk mencapai target FOLU, Pemerintah menetapkan enam rencana mitigasi, termasuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (REDD+); mengembangkan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut termasuk bakau; serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, pendekatan yurisdiksi dapat menjadi pendekatan penting bagi yurisdiksi daerah untuk mengembangkan strategi REDD+ secara holistik dan melaksanakan RAN KSB secara terintegrasi, dengan menggabungkan upaya perlindungan hutan dan intensifikasi pertanian berkelanjutan. Indikator kemajuan dalam mengarusutamakan konsep JA ke dalam praktik dan kebijakan pembangunan nasional adalah integrasi pendekatan yurisdiksi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bekerja sama dengan mitra pembangunan, NGO, dan akademisi untuk menyusun Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah berdasarkan JA<sup>31</sup>. Karya ini dipublikasikan pada tahun 2020 untuk memandu pelaksanaan JA berdasarkan RPJMN. Untuk memberikan informasi tepercaya dan akurat mengenai kinerja keberlanjutan berbagai yurisdiksi di Indonesia, terutama dari sektor pertanian, Bappenas tengah mengembangkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (*Sustainable Jurisdiction Indicators/SJI*) yang diluncurkan pada akhir tahun 2022<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> OPERATIONAL PLAN INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 - Kementerian LHK ([menlhk.go.id](http://menlhk.go.id))

<sup>30</sup> PERPRES No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

<sup>31</sup> Panduan - Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi

<sup>32</sup> [Terpercaya | European Forest Institute \(efi.int\)](http://Terpercaya|EuropeanForestInstitute(efi.int))



## Kerangka kebijakan daerah dan program PL/PY

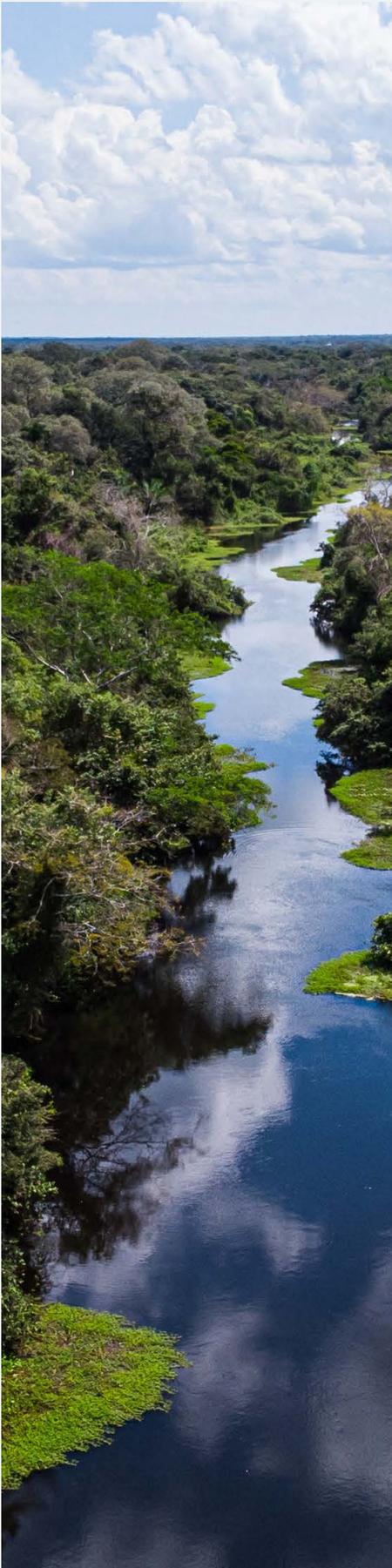
Sub bagian ini menyajikan deskripsi mengenai beberapa program terpenting PL/PY yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Brasil dan Indonesia (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Ringkasan program PL/PY di tingkat daerah di Brasil dan Indonesia<sup>33</sup>

Program PL/PY	Negara Bagian/ Provinsi, Negara	Tahun	Tujuan utama
Produksi, Konservasi, dan Pelibatan Sosial ( <i>Produce, Conserve, and Include/PCI</i> )	Mato Grosso, Brasil	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani investasi untuk meningkatkan dampak dan mendorong pembangunan berkelanjutan di negara bagian ini.</li> <li>Emisi nol bersih.</li> </ul>
Wilayah Berkelanjutan ( <i>Sustainable Territories</i> )	Pará, Brasil	2019	Menawarkan alternatif transisi ekonomi untuk wilayah yang terdampak deforestasi dan menawarkan kompensasi agar dapat mengatasi hambatan mulai dari penegakan peraturan lingkungan dan kepemilikan tanah hingga promosi pasar untuk rantai nilai berkelanjutan.
Platform Produksi dan Perlindungan ( <i>Produce and Protect Platform/ PPP Acre</i> )	Acre, Brasil	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi deforestasi sebesar 80% dan emisi GRK akibat deforestasi sebesar 80% berdasarkan periode tahun 1996-2005.</li> <li>Menyusun rencana pengelolaan secara penuh dan mewujudkan komitmen tanpa deforestasi di kawasan lindung negara bagian ini serta meningkatkan luas kawasan lindung sebesar 155.120 ha.</li> <li>Merestorasi area terdegradasi di properti pedesaan yang terdaftar dalam Register Lingkungan Pedesaan dan merestorasi Kawasan Pelestarian Permanen (APP) di Daerah Aliran Sungai Acre.</li> <li>Mengurangi angka kemiskinan dan kematian anak.</li> <li>Mengintensifkan produksi hasil hutan secara berkelanjutan, menetapkan pengelolaan kayu berbasis masyarakat seluas 180.000 ha dan pemanenan berdampak rendah seluas 180.000 ha di hutan tanaman industri hingga tahun 2030.</li> </ul>
Tocantins yang Kompetitif dan Berkelanjutan ( <i>Competitive and Sustainable Tocantins</i> )	Tocantins, Brasil	2020	Mendorong pembangunan yang merata dan kompetitif di negara bagian Tocantins, dengan pemanfaatan sumber daya alam secara wajar, penghormatan terhadap generasi selanjutnya, dan peningkatan kualitas hidup penduduknya <sup>34</sup> .
Pakta Produksi, Konservasi, dan Pelibatan Sosial Wilayah Balsas (PCI Maranhão)	Maranhão, Brasil	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan ekspansi dan meningkatkan efisiensi produksi pertanian dan hutan.</li> <li>Mengonservasi vegetasi asli dan merestorasi area terdegradasi.</li> <li>Melakukan pelibatan sosial ekonomi terhadap pertanian keluarga dan penduduk tradisional<sup>35</sup>.</li> </ul>
Riau Hijau	Riau, Indonesia	2021	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, memperluas tutupan vegetasi, meningkatkan kualitas udara dan air, dan melakukan tindakan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan.
JREDD+, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Indonesia	Dari tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan tata kelola provinsi untuk tindakan pengurangan emisi terkait sumber daya hutan dan alam.</li> <li>Mengatur tata ruang dan perizinan.</li> </ul>
JREDD+, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat, Indonesia	Dari tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun tata kelola dan partisipasi para pemangku kepentingan.</li> <li>Meningkatkan investasi iklim strategis dalam wilayah yurisdiksi terkait.</li> </ul>

33 Catatan: Tabel ini hanya mencantumkan program PL/PY yang dimulai dan/atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah di yurisdiksi daerah yang spesifik. Oleh karena itu, informasi dalam tabel ini tidak menyeluruh dan tidak ditujukan untuk membahas semua program PL/PY di Brasil dan Indonesia.

34 [Tocantins State Administration](#)



## Brasil

### Mato Grosso -Produksi, Konservasi, dan Pelibatan Sosial (PCI)

Negara Bagian Mato Grosso, yang terletak di persimpangan antara Amazon dan Cerrado, adalah salah satu penggerak pertanian serta produsen dan pengekspor utama kedelai di Brasil. Mato Grosso memiliki sejarah panjang deforestasi yang tinggi, terutama akibat kegiatan pertanian dan peternakan sapi skala besar. Selain itu, deforestasi ini juga disebabkan oleh kolonisasi pertanian, pertambangan, dan penebangan skala kecil secara tidak berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, Pemerintah Mato Grosso dikenal memprioritaskan model pembangunan tidak berkelanjutan berbasis komoditas yang berisiko terhadap hutan dengan mengorbankan kekayaan ekosistem di negara bagian tersebut.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Mato Grosso mulai mengakui pentingnya memperkuat kerangka kebijakan lingkungan negara bagian tersebut. Beberapa kebijakan telah ditetapkan, yang paling relevan di antaranya yaitu Sistem untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; Konservasi; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Stok Karbon Hutan (REDD+)<sup>36</sup>; Kebijakan terkait Perubahan Iklim<sup>37</sup>; Rencana untuk Mengendalikan Deforestasi dan Kebakaran Hutan; Rencana Netralitas Karbon Mato Grosso; dan partisipasi dalam kampanye Perlombaan menuju Emisi Nol Bersih (*Race to Zero*)<sup>38</sup>. Meskipun ada peningkatan kelembagaan dan hukum, Mato Grosso masih menyandang predikat sebagai salah satu wilayah dengan laju deforestasi tertinggi di Brasil.

Untuk memperkuat keterlibatan sejumlah pemangku kepentingan dan mencapai tujuan bersama dalam agenda lingkungan dan pembangunan perdesaan di negara bagian ini, pemerintah membentuk Inisiatif **Produksi, Konservasi, dan Pelibatan Sosial (Produce, Conserve and Include -PCI)** pada tahun 2015<sup>39</sup>, yang dianggap sebagai salah satu program JA paling penting di Brasil. PCI mempromosikan berbagai proyek sosial dan lingkungan dengan tujuan mendatangkan investasi guna meningkatkan dampak dan mendorong pembangunan berkelanjutan di negara bagian ini. Sejak bulan Oktober 2021, target pengurangan emisi Mato Grosso telah diintegrasikan ke dalam serangkaian tujuan Strategi PCI<sup>40</sup>. Pencapaian tujuan konservasi hutan dan target netralitas karbon Mato Grosso secara intrinsik terhubung dengan tujuan pelestarian hutan negara bagian ini dan kemampuan perusahaan dalam melakukan tindakan penanganan perubahan iklim, terutama dari perusahaan agribisnis<sup>41</sup>.

36 Undang-Undang Negara Bagian No. 9878/2013.

37 Undang-Undang Pelengkap Negara Bagian No.582/2017.

38 Keputusan Negara Bagian No.1160/2021.

39 Informasi lebih lanjut tentang inisiatif, proyek dan hasil tersebut dapat dilihat di: <http://pci.mt.gov.br/> - [https://pcimontor.org/](https://pcimontor.org/index.php/).

40 CDP. Produce, Conserve and include Initiative in Mato Grosso. A Brazilian case study on jurisdictional approaches, p.9.

41 CDP. Produce, Conserve and include Initiative in Mato Grosso. A Brazilian case study on jurisdictional approaches, p.9.



**Selain mendorong sinergi antara pemangku kepentingan sektor publik, swasta, dan pihak ketiga yang terlibat dalam inisiatif pembangunan sosial ekonomi rendah karbon di Pará, juga merupakan pusat upaya peningkatan hasil inisiatif di wilayah tersebut.**



### **Pará - Wilayah Berkelanjutan (*Sustainable Territories/ST*)**

Pará, yang merupakan negara bagian terbesar kedua di Legal Amazon, memiliki laju deforestasi tertinggi di Brasil pada tahun 2021<sup>42</sup>. Penyebab utama deforestasi di negara bagian ini adalah peternakan sapi, pertanian skala besar, pertambangan, penebangan secara tidak berkelanjutan, serta produksi arang dan kayu bakar. Dalam upaya mengatasi berbagai penyebab tersebut, Pemerintah Pará telah menetapkan beberapa kebijakan dan inisiatif penting, antara lain kebijakan negara bagian terkait Perubahan Iklim<sup>43</sup>, Rencana Negara Bagian 'Amazon Now' (*Plano Estadual Amazônia Agora/PEAA*), Dana Amazon Bagian Timur, Rencana Peraturan Lingkungan Pará, dan Label Hijau (*Selo Verde*) yang merupakan platform digital untuk melacak komoditas yang berisiko terhadap hutan, terutama daging sapi<sup>44</sup>.

Sebagai negara bagian yang sangat relevan untuk PL/PY, Pará memiliki poros pembangunan ekonomi rendah karbon, yang bertujuan untuk memberi nilai terhadap ekonomi hutan dan produksi berkelanjutan guna mencapai tujuan iklimnya<sup>45</sup>. Dalam poros ini, kebijakan **Wilayah Berkelanjutan**<sup>46</sup> mencantumkan strategi pendekatan yurisdiksi dengan tujuan utamanya "menawarkan alternatif bagi area yang mengalami tekanan deforestasi untuk transisi ekonomi dan kompensasi sehingga area tersebut dapat mengatasi hambatan mulai dari penegakan peraturan lingkungan dan kepemilikan tanah hingga promosi pasar untuk rantai nilai berkelanjutan"<sup>47</sup>.

Untuk mendukung pendekatan yurisdiksi ini, Platform Digital Wilayah Berkelanjutan<sup>48</sup> "selain mendorong sinergi antara pemangku kepentingan sektor publik, swasta, dan pihak ketiga yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan sosial ekonomi rendah karbon di Pará, juga merupakan pusat upaya peningkatan hasil inisiatif di wilayah tersebut"<sup>49</sup>.

Platform ini juga memiliki Observatorium Wilayah Berkelanjutan, sebuah alat geospasial yang mendukung implementasi kebijakan publik dan swasta untuk menunjang para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan platform tersebut.

42 [MapBiomass. Annual Report on Deforestation \(2021\) - São Paulo, Brasil, p.46](#). Pará adalah Negara Bagian dengan emisi paling tinggi di Brasil. Pada tahun 2020, akibat perubahan pemanfaatan lahan, Negara Bagian ini melepas emisi 354.2 metrik ton CO2. [SEEG. Análise das emissões brasileiras de Gases de Efeito Estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil 1970-2020](#). 2021, halaman 31.

43 Undang-Undang Negara Bagian No. 9.048 Tahun 2020.

44 Untuk deskripsi inisiatif ini, lihat [Tropical Forest Alliance and MN Socioflorestal. Amazon Now: Private Sector Opportunities for a Low-Carbon Economy in Pará, Brazil, May 2022](#).

45 [Tropical Forest Alliance and MN Socioflorestal. Amazon Now: Private Sector Opportunities for a Low-Carbon Economy in Pará, Brazil, May 2022](#).

46 Keputusan Negara Bagian No 344/2019.

47 [Tropical Forest Alliance and MN Socioflorestal. Amazon Now: Private Sector Opportunities for a Low-Carbon Economy in Pará, Brazil, May 2022, p.14](#).

48 [Website](#).

49 [Tropical Forest Alliance and MN Socioflorestal. Amazon Now: Private Sector Opportunities for a Low-Carbon Economy in Pará, Brazil, May 2022, p.14](#).

Sekitar

12%

tutupan hutan asli di negara bagian ini telah hilang karena deforestasi, dan sekitar

80%

wilayah yang terdeforestasi saat ini dipergunakan untuk peternakan.



### Acre – Platform Produksi dan Perlindungan (PPP Acre)

Tidak seperti Mato Grosso dan Pará yang merupakan yurisdiksi besar dengan kapitalisasi agroindustri yang tinggi, situasi perekonomian Acre jauh lebih rendah dibandingkan kedua negara bagian tersebut. Sebagian besar deforestasi di Acre terjadi di permukiman kecil di sepanjang jalan di bagian selatan yang merupakan wilayah dengan populasi lebih padat. Saat ini, sekitar 12% tutupan hutan asli di negara bagian ini telah hilang karena deforestasi, dan sekitar 80% wilayah yang terdeforestasi saat ini dipergunakan untuk peternakan.

Acre telah menjadi pelopor yang menyertakan perlindungan hutan sebagai inti dalam strategi pembangunannya untuk meningkatkan kualitas hidup produsen di perdesaan, masyarakat di pinggir sungai dan masyarakat ekstraktif, serta Masyarakat Adat. Selama lebih dari 40 tahun, gerakan akar rumput lingkungan telah menjadikan koperasi sebagai tradisi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan lebih dari 2.500 keluarga petani yang mengandalkan hasil hutan<sup>50</sup>. Dalam skenario ini, inisiatif yurisdiksi Acre telah memainkan peran krusial untuk mencapai transformasi yang mendorong pengurangan deforestasi di lanskap terdeforestasi dan meningkatkan nilai produk sosial dan keanekaragaman hayati sehingga menjadikan negara bagian ini sebagai yurisdiksi REDD+ yang paling maju di dunia<sup>51</sup>.

Sistem Insentif terhadap Jasa Lingkungan (SISA) dibentuk pada tahun 2010 sebagai strategi wilayah yang dirancang untuk menghadapi perubahan iklim<sup>52</sup>. Sistem ini memiliki tujuh program, termasuk Insentif Jasa Lingkungan dan Karbon (ISA Carbono), dan pemerintah telah menandatangani perjanjian kerja sama keuangan dengan Jerman untuk memulai Program Penggerak Awal Global REDD (REM). Salah satu hasilnya adalah “total deforestasi yang berhasil dicegah pada periode 2007-2017 seluas 282,525 ha”<sup>53</sup>. Pada tahun 2017, ketika CO-P 23 berlangsung, Acre meluncurkan Strategi Yurisdiksi<sup>54</sup> - Platform Produksi dan Perlindungan (PPP Acre). Strategi ini memiliki beberapa keunggulan untuk memantau, mengevaluasi, dan membantu publikasi strategi pengembangan keberlanjutan pemerintah berikut:

- ▼ Dasbor publik sebagai tempat pemantauan semua tujuan pendekatan yurisdiksi;<sup>55</sup>
- ▼ Dasbor publik yang memiliki data sosial lingkungan;<sup>56</sup>
- ▼ Portofolio investasi bisnis untuk berbagai hasil hutan dan komoditas yang diproduksi di Acre<sup>57</sup>.

50 [M. de los Rios, O. David, C. Stickler, D. Nepstad. 2018. "Acre, Brazil" in C. Stickler et al. \(Eds.\), The State of Jurisdictional Sustainability. San Francisco, CA:Ell; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO:GCF-TF.](#)

51 [M. de los Rios, O. David, C. Stickler, D. Nepstad. 2018. "Acre, Brazil" in C. Stickler et al. \(Eds.\), The State of Jurisdictional Sustainability. San Francisco, CA:Ell; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO:GCF-TF.](#)

52 Undang-Undang Brasil No. 2.0308/10.

53 [Acre Jurisdictional Profile \(2018\). Earth Innovation Institute. Detailed Report, hal. 4.](#)

54 Instituto Sociambiental. Lançada Plataforma que dá acesso aos dados socioeconômicos e ambientais do Acre (2017).

55 [Dasbor Monitoring & Evaluasi Tujuan Pendekatan Lanskap Acre.](#)

56 [Data sosial lingkungan Acre.](#)

57 [Portofolio investasi bisnis Acre.](#)

**Rencana  
Mencegah dan  
Mengatasi  
Deforestasi dan  
Kebakaran Hutan  
(PPCDIF 2021-  
2025) bertujuan  
mengurangi  
deforestasi ilegal  
sepenuhnya  
pada tahun 2025.**



**Tocantins - Tocantins yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan  
(Competitive and Sustainable Tocantins/CST)**

Sebagian wilayah Tocantins berada di Amazon (13%) dan Cerrado (87%). Tocantins merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Cerrado, dengan wilayah terdeforestasi seluas 48,293 km<sup>2</sup> pada periode tahun 2001 sampai 2022. Penyebab utama deforestasi di wilayah ini adalah<sup>58</sup> peternakan, pertanian skala besar, pertanian dan pengembangan skala kecil, pembangunan infrastruktur transportasi, dan penebangan liar dan pertambangan batu bara skala kecil.

Untuk mengatasi penyebab tersebut, Tocantins telah menyusun Rencana Mencegah dan Mengatasi Deforestasi dan Kebakaran Hutan (PPCDIF 2021-2025) yang bertujuan mengurangi deforestasi ilegal sepenuhnya pada tahun 2025<sup>59</sup>. PPCDIF menggabungkan tindakan pencegahan, mekanisme atur dan awasi (*command and control*), dan penanggulangan dan pemantauan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan. Selain PPCDIF, kerangka kebijakan lingkungan negara bagian berisi kebijakan umum mengenai lingkungan<sup>60</sup> dan hutan<sup>61</sup>, Undang-Undang Perubahan Iklim, Konservasi Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan<sup>62</sup>, serta inisiatif yang belum lama diberlakukan, terutama Undang-Undang Pembayaran atas Jasa Lingkungan<sup>63</sup> dan Dana Iklim Wilayah (Funclima)<sup>64</sup>.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Tocantins telah mengembangkan strategi yurisdiksi pembangunan berkelanjutan dan daya saing nasional dan internasional yang disebut **Tocantins yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**<sup>65</sup> (**Competitive and Sustainable Tocantins/CST**). Strategi ini memiliki tujuan, panduan, dan strategi yang dibentuk berdasarkan empat pilar, yakni 1) Ekonomi; 2) Sosial; 3) Lingkungan; dan 4) Infrastruktur.

Dihadapkan dengan meningkatnya komitmen dan legislasi global untuk pengembangan rendah emisi, strategi ini menunjukkan upaya pemerintah dan sektor lainnya untuk memperkuat penggunaan teknik dan pengetahuan teknologi yang terkait dengan pendekatan yurisdiksi. Bagi pemerintah, strategi ini dapat menjamin kesinambungan yang lebih maju terhadap rantai produksi, membantu menghadapi deforestasi dan kebakaran yang dilakukan secara ilegal, dan mendukung fokus terhadap masyarakat yang beragam dan rentan, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif<sup>66</sup>. Strategi ini juga mencakup tingkat tata kelola, pemantauan, transparansi, dan investasi.

58 [M. de los Rios, A.C. Crisostomo, O. David, C. Stickler. 2020. "Tocantins, Brazil" in C. Stickler et al. \(Eds.\), dalam The State of Jurisdictional Sustainability. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.](#)

59 SEMARH-TO. 2021. [Plano de Prevenção e Combate aos Desmatamentos e Incêndios Florestais do Estado do Tocantins \(PPCDIF\).](#)

60 Undang-Undang No. 261 tahun 1991.

61 Undang-Undang No. 771 tahun 1995.

62 Undang-Undang No. 1.917, 17 April 2008.

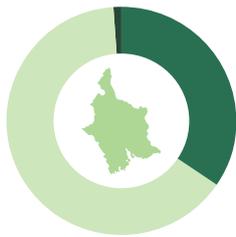
63 Undang-Undang No. 4111 tahun 2023.

64 Undang-Undang No. 4131 tahun 2023.

65 Lihat lampiran.

66 SEMARH-TO. 2021. [Estratégia Tocantins Competitivo e Sustentável.](#)

### Maranhão pertemuan dari beberapa bioma:



- Cerrado 64%
- Amazon 35%
- Caatinga 1%

### Maranhão – Pakta Produksi, Konservasi, dan Penyertaan di Wilayah Balsas (PCI Maranhão)

Maranhão terletak di lokasi yang menjadi tempat pertemuan tiga bioma, yakni Amazon (35% dari luas wilayah), Cerrado (64%), dan Caatinga (1%) sehingga wilayah ini pun menjadi mosaik lanskap yang kaya akan keanekaragaman hayati. Penyebab utama deforestasi di wilayah ini adalah pertambangan, penggembalaan ternak, pertanian skala besar, pertanian dan pengembangan skala kecil, penebangan yang tidak berkelanjutan, dan produksi arang dan kayu bakar. Maranhão berada di antara empat wilayah dengan tingkat deforestasi paling banyak pada periode tahun 2019 hingga 2021<sup>67</sup>.

Salah satu alat bantu pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan adalah program Kemitraan Maranhão (MAPA),<sup>68</sup> suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menyusun kemitraan strategis dengan sektor swasta berdasarkan peluang bisnis<sup>69</sup>. Pada tahun 2021, MAPA memiliki penambahan fungsi, yang di antaranya adalah mengelola kredit yang dihasilkan dari jasa dan produk lingkungan, dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi, khususnya dari penciptaan pengaturan keuangan, ekonomi, dan investasi hijau. Pengembangan strategi bertujuan untuk mengerahkan dan meningkatkan sumber daya keuangan dan investasi, seperti JREDD+ dan JA/LA, juga disertakan<sup>70</sup>. Selain MAPA, kebijakan lingkungan penting lainnya di Maranhão adalah kebijakan lingkungan daerah<sup>71</sup> dan kebijakan hutan dan keanekaragaman hayati<sup>72</sup>, Zonasi Ekologi dan Ekonomi Bioma Amazon<sup>73</sup> dan Cerrado<sup>74</sup>, Forum Perubahan Iklim Maranhão<sup>75</sup>, Rencana Hijau Maranhão<sup>76</sup>, dan Kebijakan Wilayah mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan dan REED+<sup>77</sup>.

Program JA Maranhão disebut **Pakta Produksi, Konservasi, dan Penyertaan di Wilayah Balsas (PCI Maranhão)** dan mencakup 12 kota dan penandatanganan pakta yang diwakili sektor publik dan swasta, beserta organisasi masyarakat sipil. Strategi yurisdiksi ini telah menentukan tujuan dan hasil sosial lingkungan bagi Pemerintah hingga tahun 2025<sup>78</sup>. Prioritas wilayah telah ditetapkan, yang dapat membantu koordinasi tindakan bersama dan adanya proyek publik/swasta. Pada bulan April 2021, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta (perusahaan, asosiasi, dan produsen) beserta masyarakat sipil di Maranhão telah meresmikan pembentukan Komite Pengelolaan Pakta.

67 G1, 2022. [Maranhão é um dos quatro Estados do Brasil que mais desmatou entre 2019 e 2021, aponta Relatório Anual de Desmatamento.](#)

68 Kemitraan Maranhão telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 11,140 tahun 2019

69 MAPA. 2021. [Undang-undang.](#)

70 MAPA. 2022. [REDD+ MAPA.](#)

71 [Undang-Undang No. 5.405/2012.](#)

72 [Undang-Undang No. 8.528 tahun 2006.](#)

73 [Undang-Undang No. 11,269 tahun 2020.](#)

74 [Undang-Undang No. 11,734 tahun 2022.](#)

75 [Undang-Undang No. 10,161 tahun 2014.](#)

76 [SK Gubernur No. 32,969 tahun 2017.](#)

77 [Undang-Undang No. 11,578 tahun 2021.](#)

78 Lihat Lampiran untuk informasi lebih lanjut.



## Indonesia

### Riau - Riau Hijau

Ekonomi Provinsi Riau di Sumatra sangat berorientasi terhadap ekspor, khususnya berbasis sektor minyak dan gas serta perkebunan sawit, yang mencakup hampir 60% luas lahan di Riau<sup>79</sup>, dan sebagian lainnya ditutupi oleh perkebunan akasia (untuk pulp dan kertas). Pada tahun 2020, Riau memiliki wilayah perkebunan sawit terbesar di Sumatra dengan luas 2,8 juta ha, dan merupakan produsen Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar dengan jumlah 9,5 juta ton<sup>80</sup>. Basis produksinya terdiri dari gabungan perkebunan milik negara, swasta, dan masyarakat. Menurut World Resources Institute, provinsi ini kehilangan tutupan pohon seluas 4 juta ha pada periode 2001-2021, yang setara dengan penurunan tutupan hutan sebesar 51% sejak tahun 2000. Penyebab utama hilangnya hutan antara lain adalah penebangan liar, perambahan ilegal, kebakaran hutan, tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konversi hutan menjadi sektor berbasis lahan lainnya (pertambangan, pertanian, dan perkebunan)<sup>81</sup>. Selain itu, Riau memiliki lahan gambut yang luas dan dapat menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan hutan, dengan luas mencapai satu pertiga total luas lahan gambut di Indonesia<sup>82</sup>.

Sejak tahun 2016, laju deforestasi di Riau telah menurun drastis. Sampai tingkatan tertentu, penurunan ini dapat dihubungkan dengan moratorium (Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019) tentang konversi hutan primer, pembukaan hutan gambut, dan ekspansi perkebunan sawit yang diberlakukan sejak tahun 2015. Di tingkat provinsi, Riau meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. Komitmen kelestarian juga dimiliki pada tingkat kabupaten di provinsi Riau, salah satunya adalah Kabupaten Siak, yang merupakan salah satu pendiri Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yaitu forum kerja sama pemerintah kabupaten. Wilayah ini telah berkomitmen melalui Kabupaten Siak Hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2018 yang bertujuan memadukan prinsip keberlanjutan ke dalam program pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>83</sup>. Selain itu, Riau merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang menjalankan program Pembangunan Rendah Karbon (*Low Carbon Development Indonesia*, LCDI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara gubernur dengan Bappenas pada tahun 2020. LCDI dinyatakan sebagai landasan utama pembangunan Indonesia di masa mendatang dalam RPJMN 2020-2024. Secara keseluruhan, LCDI bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Laporan LCDI menguraikan sejumlah skenario yang selaras dengan ENDC bagaimana cara Indonesia dapat mencapai target Persetujuan Paris hingga tahun 2030 dan tujuan nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

79 Industri Sawit di Indonesia - Produksi & Ekspor CPO | Indonesia Investments ([indonesia-investments.com](https://indonesia-investments.com))

80 Ditjenbun (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia), 2021. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional. Kementerian Pertanian, Jakarta.

81 Pemerintah Provinsi Riau, 2021. Peraturan Gubernur Riau No. 9/2021 tentang Riau Hijau 2019-2024.

82 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 130/MENKLH/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

83 <https://siakhijau.or.id/>



**Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mengikuti dan menerapkan REDD+ berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.**

Adopsi konsep JA secara implisit terdapat dalam Rencana Aksi Daerah Riau Hijau melalui Peraturan Gubernur Riau No 9 Tahun 2021<sup>84</sup>. Riau Hijau bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi multi-pihak. Rencana aksi tersebut menjelaskan tujuan untuk meningkatkan tutupan lahan. Kualitas air dan udara, dan aksi adaptasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Meskipun Provinsi Riau belum secara eksplisit mengadopsi JA, Riau Hijau merupakan salah satu inisiatif awal dalam penyebaran konsep JA di provinsi. Hal ini dikarenakan Riau Hijau secara langsung dipimpin oleh pemerintah daerah dan telah menetapkan target yang jelas, termasuk skema monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut, Riau Hijau dikembangkan berdasarkan RPJMD yang telah disusun, menegaskan bahwa komitmen untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik selaras dengan tujuan yang dicanangkan provinsi kedepannya.

**Kalimantan Timur – JREDD+**

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan lebih dari 60% luas kawasannya ditutupi hutan<sup>85</sup>. Kalimantan Timur memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita kedua tertinggi di Indonesia dan kegiatan ekonominya sebagian besar berbasis ekstraksi sumber daya alam, seperti batu bara, kayu, dan minyak dan gas<sup>86</sup>. Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil karbon ketiga terbesar di Indonesia setelah Kalimantan Tengah dan Riau karena deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tanaman perkebunan, pertambangan, hutan tanaman, pertanian subsisten, praktik penebangan yang tidak berkelanjutan, kebakaran hutan dan lahan, akuakultur, dan pertanian, yang menghasilkan hingga sebesar 85% dari total emisinya. Pada periode tahun 2001-2021, Kalimantan Timur telah kehilangan 3,55 juta ha tutupan pohon<sup>87</sup>.

Kalimantan Timur tidak memiliki program pendekatan yurisdiksi khusus, dan implementasi kebijakan konservasi tingkat yurisdiksi dijalankan dalam konteks program REDD+ provinsi. Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mengikuti dan menerapkan REDD+ berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia<sup>88</sup>. Kalimantan Timur juga telah bergabung dengan GCF-TF dan memberlakukan Komitmen Kalimantan Timur Hijau melalui Peraturan Gubernur No. 22 tahun 2011.

Upaya REDD+ di provinsi ini difokuskan pada peningkatan tata kelola lahan, penguatan kapasitas pemerintah untuk pengelolaan hutan, pengurangan deforestasi terkait ekspansi perkebunan sawit, penebangan berlebihan dan hutan tanaman, pengurangan perambahan dengan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat,

<sup>84</sup> [Peraturan Riau Hijau](#)

<sup>85</sup> <https://kaltimprov.go.id/halaman/potensi-kehutanan#:~:text=Potensi%20Kehutanan&text=Luas%20hutan%20Kalimantan%20Timur%20tahun,%2C%20dan%20hutan%20pendidikan%2Fpenelitian.>

<sup>86</sup> <https://kaltim.bps.go.id/indicator/8/36/1/nilai-ekspor---impor-bulanan-.html>

<sup>87</sup> [Global forest watch](#)

<sup>88</sup> <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/11/08/indonesia-receives-first-payment-for-reducing-emissions-in-east-kalimantan>

pengelolaan program, dan monitoring dan evaluasi. Guna menjalankan tindakan ini, pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mendanai 75% dari total anggaran, sedangkan sisanya didanai oleh sektor swasta dan mitra lainnya.

Kepemimpinan Gubernur dan pembentukan kelompok kerja multi-pemangku kepentingan, yakni Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), yang diwakili pemerintah setempat, akademisi, dan masyarakat sipil, telah berkontribusi signifikan terhadap pengembangan dan penerapan aksi lingkungan di provinsi ini. DPPI telah secara aktif mengembangkan, di antaranya, Strategi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Kalimantan Timur, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur untuk REDD+ (*Strategy and Action Plan for REDD+*, SRAP), serta pemantauan kontribusi di setiap sektor. Persoalan terkait perubahan iklim telah disertakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016-2036 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024 dengan menyertakan aspek yang terkait dengan SDG, perencanaan pengurangan Gas Rumah Kaca, penilaian dampak lingkungan strategis, dan keanekaragaman hayati. Untuk itu, keselarasan komitmen hijau dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kebijakan terkait dapat membantu memastikan aksi yurisdiksi menuju tujuan lingkungan provinsi.

## Peraturan Provinsi tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan mendorong sektor swasta dalam industri berbasis lahan untuk melakukan konservasi hutan alami (Nilai Karbon Tinggi/NKT) dalam konsesinya minimal

# 7%

dari kawasan konsesi.

### Kalimantan Barat – JREDD+

Kalimantan Barat, yang juga terletak di Pulau Kalimantan, memiliki area yang sebagian besar ditutupi hutan (37,68%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 20% PDB provinsi, dengan investasi yang kuat terhadap tanaman perkebunan, khususnya sawit (yang menyumbang produksi pertanian sebesar 53%)<sup>89</sup>. Deforestasi di Kalimantan Barat disebabkan oleh pembukaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit atau perkebunan agroindustri lainnya. Kebakaran hutan merupakan persoalan lingkungan yang berulang kali muncul di daerah ini, begitu pula pencemaran lahan dan air dari praktik pertambangan dan pertanian ilegal. Konflik lahan dan persoalan hak Masyarakat Adat merupakan masalah lainnya yang melanda Kalimantan Barat, yang kadang muncul dari perambahan lahan yang disebabkan kegiatan pertanian dan industri.

Sama halnya dengan Riau dan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat juga mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang menyertakan persoalan terkait perubahan iklim dan hutan, dengan deforestasi, degradasi, dan pengelolaan limbah sebagai persoalan penting yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap perubahan iklim dan pemanfaatan lahan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan. Peraturan ini mendorong sektor swasta dalam industri berbasis lahan untuk melakukan konservasi hutan alami (Nilai Karbon Tinggi/NKT) dalam konsesinya minimal sebanyak 7% dari kawasan konsesi. Melalui peraturan ini, pemerintah provinsi mempunyai peran yurisdiksi untuk menjaga pengembangan hutan, termasuk konservasi hutan guna mendukung komitmen Kalimantan Barat untuk mengurangi emisi GRK dari sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) sebesar 60% pada tahun 2020<sup>90</sup>. Kalimantan Barat juga telah menetapkan komitmen mengenai pembangunan lahan berkelanjutan, khususnya dalam empat topik berikut:

- 1  **Pengelolaan berbasis lahan berkelanjutan oleh perusahaan sosial**
- 2  **Pencegahan kebakaran hutan**
- 3  **Perencanaan aksi regional mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**
- 4  **Perencanaan aksi regional mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan rendah karbon.**

Seperti halnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat tidak memiliki program Pendekatan Yurisdiksi secara khusus, hanya saja terdapat kumpulan kebijakan di tingkat yurisdiksi yang terkait dengan penerapan REDD+. Pemerintah Kalimantan Barat telah terlibat aktif dalam ruang kebijakan multi-pemangku kepentingan sejak tahun 2010, sejalan dengan keterlibatannya dalam GCF-TF. Pada tahun 2012, telah dibentuk Gugus Tugas REDD+ melalui Keputusan Gubernur No. 115/BLHD/2012. Pada tahun 2016, Kalimantan Barat menjadi provinsi pertama yang memublikasikan perhitungan Tingkat Rujukan Emisi Hutan (FREL) dengan bekerja sama dengan para akademisi dan NGO. Penyusunan dokumen FREL dibuat berdasarkan visi dan misi yang dicantumkan dalam dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) yang dipublikasikan pada tahun 2013<sup>91</sup>. Pada tahun 2015-2016, Kalimantan Barat ditunjuk sebagai koordinator GCF-TF untuk mewakili lima provinsi di Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh, Papua, dan Papua Barat).

Prospek pendanaan REDD+ membuka titik masuk bagi sejumlah inisiatif awal JA di tingkat provinsi dan merupakan faktor yang memotivasi gubernur baru untuk mempertahankan dukungan terkait kebijakan<sup>92</sup>. Kalimantan Barat mencatat jumlah program REDD+ terbesar dalam yurisdiksinya sejak tahun 2012, yang telah dijalankan dengan berbagai jenis pendanaan yang berkolaborasi dengan beragam jenis pemangku kepentingan. Komitmen pendekatan yurisdiksi di Kalimantan Barat difokuskan pada topik perlindungan dan konservasi hutan dan lahan gambut. Pada tahun 2016, tiga pilar utama berikut dibuat sebagai strategi untuk mengurangi emisi:



## 1 Penguatan unit pengelola hutan



## 2 Pengaturan tata ruang dan izin



## 3 Penjajakan kemitraan dengan sektor swasta guna memastikan dihasilkannya komoditas secara berkelanjutan dan dengan cara yang ramah lingkungan

Selain itu, Sistem Informasi Safeguard (SIS) dan instrumen Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) telah dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan REDD di Kalimantan Barat.

# Tantangan Penerapan PL/PY



3

# Tantangan Penerapan PL/PY



## Kurangnya pengakuan terhadap PL/PY

Dengan belum teradopsinya PL/PY secara gamblang mengakibatkan kurangnya paparan PL/PY pada kebijakan maupun peraturan. Saat ini, semakin banyak penelitian yang menegaskan PL/PY sebagai kerangka implementasi utama untuk mencapai berbagai tujuan lingkungan dan sosial yang saling terhubung, diuraikan dalam berbagai perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep PL/PY yang masih baru dan bersifat akademis sejauh ini belum banyak diterapkan dan belum umum disertakan secara praktis dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Studi dan artikel teknis mengenai kesenjangan dan tindakan yang diperlukan untuk mempercepat adopsi LA/JA menambahkan beberapa aspek penting pada kesimpulan yang diuraikan. Mengenai pengakuan formal terkait LA/JA, ditekankan bahwa “para pembuat kebijakan perlu meningkatkan keterlibatan lintas kementerian untuk mendorong pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan tujuan yang tidak selaras dan kompetitif dalam setiap lanskap”<sup>93</sup>. Temuan lain juga menyoroti perlunya menjaga dukungan politik untuk LA/JA setelah adanya pergantian pemerintahan dan birokrasi<sup>94</sup>.



## Tidak adanya standarisasi

Kebijakan global masih kurang memberikan standarisasi terhadap konsep ini, misalnya melalui panduan normatif atau dukungan karya ilmiah yang mendukung penyediaan informasi berbasis bukti tentang PL/PY. Namun, di lain sisi, berbagai inisiatif yang diusung pemangku kepentingan di tingkat internasional, regional, atau nasional yang mendorong PL/PY, dalam beberapa hal, mampu melengkapi aspek-aspek yang tidak tercakup dalam kebijakan global tersebut. Sebagai permulaan, inisiatif ini menyediakan panduan normatif (misalnya, ISEAL) dan mengadakan diskusi kelompok antar korporasi (misalnya, Forest Positive Coalition).

<sup>93</sup> [How landscape approaches can help achieve the SDGs – in three \(challenging\) steps - CIFOR Forests News](#)

<sup>94</sup> [Pendekatan lanskap menuju penggunaan sumber daya berkelanjutan - Evidensia](#)



## Kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan/ insentif yang mendukung pelibatan sektor swasta.

Kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan/insentif pendukung untuk pelibatan sektor swasta menyebabkan belum banyaknya kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah tidak memahami cara menarik sektor swasta, dan sektor swasta belum sepenuhnya mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan PL/PY. Faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya ketersediaan data hingga tidak adanya platform pertukaran data dan informasi. Dibandingkan dengan tersedianya kebijakan lingkungan global yang mengatur hal ini, inisiatif yang dipimpin oleh pemangku kepentingan di tingkat internasional, regional, atau nasional yang bertujuan untuk mengatasi persoalan ini baik dengan adanya dorongan dari atau adanya integrasi yang kuat dengan sektor swasta lebih baik dalam menyediakan data tentang PL/PY (misalnya, LandScale).

Untuk informasi berbasis bukti mengenai PL/PY, penelitian menunjukkan kurangnya bukti tentang efektivitas PL/PY<sup>95,96</sup>. Namun, studi lainnya menyimpulkan bahwa "kurangnya bukti memang membatasi kemampuan untuk menunjukkan aspek dan kondisi yang memastikan keberhasilan (atau bahkan kelayakan) pendekatan lanskap"<sup>97</sup>. Para penulis juga menyimpulkan bahwa masih belum mengetahui dengan pasti cara terbaik untuk melibatkan sektor swasta dalam PL/PY. Mengenai persoalan keuangan, peneliti berpendapat bahwa PL/PY "memerlukan sumber pendanaan yang besar dan menarik, serta mempertahankan pendanaan yang memadai juga menjadi tantangan utama"<sup>98</sup>.



95 <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264837716312091>

96 [Mengukur efektivitas pendekatan lanskap untuk konservasi dan pembangunan | SpringerLink](#)

97 [Pendekatan lanskap terpadu di kawasan tropis: Penilaian singkat - ScienceDirect](#)

98 [Pendekatan yurisdiksi terhadap penggunaan sumber daya yang berkelanjutan - Evidensia](#)

**Tabel 4: Tantangan tertentu dalam penerapan dan pelaksanaan program PL/PY di Brasil dan Indonesia**

Tabel ini disusun berdasarkan lima unsur struktural yang harus dimiliki oleh “semua inisiatif yurisdiksi yang ingin berjalan efektif” berdasarkan Panduan Praktik Baik ISEAL (ISEAL *Good Practice Guide*)<sup>99</sup> untuk pendekatan yurisdiksi.

Unsur Struktural	Mato Grosso	Pará	Acre	Tocantins	Maranhão	Riau	Kalimantan Timur	Kalimantan Barat
 <p><b>Pemangku kepentingan yang dilibatkan</b></p> <p>Pemangku kepentingan utama dalam yurisdiksi, termasuk pemerintah setempat dan perusahaan produsen teridentifikasi dan terlibat secara aktif dalam inisiatif.</p>	<p>Konflik kepentingan antara kelompok ekonomi tradisional dengan pemangku kepentingan yang kurang berpengaruh yang tidak mampu menempatkan dan mempertahankan posisinya (misalnya, berhenti menggunakan pestisida dan mendukung produksi organik), sama halnya seperti produsen komoditas besar yang memiliki peluang lebih besar dengan pemimpin politik.</p>				<p>PCI Maranhão bisa mendapatkan manfaat dari pertimbangan masyarakat yang lebih baik mengenai masalah perubahan iklim sehingga dapat membantu tindakan masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk wilayahnya. Dengan adanya jaringan pihak yang terlibat yang secara berkala mendiskusikan strategi untuk menghadapi persoalan lingkungan, proyek PL/PY dapat menerima perhatian yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan, yang dapat membantu pelestarian hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan manfaat lainnya.</p>			
 <p><b>Tata kelola</b></p> <p>Prosedur operasi yang jelas dan transparan menentukan kedudukan hukum terkait inisiatif dan peran tata kelola, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan untuk berbagai pemangku kepentingan dalam inisiatif tersebut.</p>	<p>Keterlibatan pemerintah dengan pendekatan yurisdiksi dapat berubah sewaktu-waktu sehingga merugikan hasil jangka panjang dan tujuan bersama. Tujuan bersama harus bersifat menyeluruh dan bebas dari tekanan politik. Jika tidak, kredibilitas dan keabsahan pendekatan yurisdiksi dapat terganggu dari waktu ke waktu.</p>				<p>Tidak adanya Pembaruan Rencana Pemerintah mengenai Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi dan Kebakaran Hutan. Pembaruan program dengan target terjadwal untuk mengurangi deforestasi dan kebakaran hutan di bioma ini tidak teridentifikasi. Rencana publik yang dapat diakses dengan mudah untuk mengidentifikasi wilayah rentan dan inisiatif perlindungan hutan sangat diperlukan agar pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap tujuan konservasi pendekatan yurisdiksi.</p>	<p>1) Pendekatan yurisdiksi sebagai kerangka pengelolaan lanskap berkelanjutan belum secara eksplisit dijadikan referensi dalam kebijakan dan peraturan utama provinsi.</p> <p>2) Kurangnya kerja sama di tingkat pusat dan daerah, disertai minimnya pengelolaan data terpadu dan kemampuan pejabat pemerintah. Hal ini ditandai dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai cara menerapkan pendekatan yurisdiksi secara praktis.</p>		
 <p><b>Kerangka Kemajuan</b></p> <p>Tujuan atau hasil dari dampak keberlanjutan, target dan tonggak capaian yang terjadwal ditetapkan untuk yurisdiksi bersangkutan, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil dan tonggak capaian tersebut dipaparkan dalam rencana aksi.</p>	<p>1) Pada tahun 2021, target strategis PCI direvisi. Dua perubahan yang menonjol adalah sebagai berikut<sup>100</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deforestasi ilegal yang seharusnya dihentikan pada tahun 2020, tetapi kemudian diundur hingga tahun 2030.</li> <li>Seharusnya, 90% properti perdesaan di Negara Bagian telah terdaftar dalam sistem CAR pada tahun 2016 (tetapi justru ditunda hingga tahun 2024). Selain itu, informasi ini seharusnya sudah divalidasi oleh pemerintah pada tahun 2018, tetapi ditunda hingga tahun 2024.</li> </ul> <p>Perubahan signifikan semacam ini menandakan kurangnya komitmen dan kemampuan negara untuk memberlakukan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh berbagai pemangku kepentingan. Seiring waktu, hal ini berpotensi mengancam kredibilitas dan legitimasi pendekatan yurisdiksi.</p> <p>2) Sejumlah target penting seperti “mencapai 0% deforestasi ilegal pada tahun 2030” sulit untuk diwujudkan, dan progresnya tidak signifikan.</p>	<p>Tujuan pendekatan yurisdiksi serta alat bantu monitoring dan evaluasi digital dari Pará resmi diluncurkan pada paruh kedua tahun 2022. Oleh karena itu, hasil yang telah dicapai belum dapat dinilai sejauh ini.</p> <p>Meski demikian, rekomendasi yang disajikan untuk kerangka kemajuan Mato Grosso juga dapat diterapkan di Pará, yaitu: perubahan signifikan pada target pendekatan yurisdiksi menandakan kurangnya komitmen dan kemampuan negara untuk memberlakukan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh berbagai pemangku kepentingan. Seiring waktu, hal ini berpotensi mengancam kredibilitas dan legitimasi pendekatan yurisdiksi.</p>	<p>Beberapa tujuan dan target terjadwal Acre sudah terlalu usang. Tidak ada informasi yang tersedia tentang hasil yang dicapai.</p>	<p>Tantangan utama yang dihadapi adalah tidak adanya platform monitoring dan evaluasi pendekatan yurisdiksi sehingga menyulitkan penilaian terhadap hasil.</p>		<p>Tujuan dan target telah ditentukan, tetapi data yang dikumpulkan belum lengkap karena sifatnya masih berbasis proyek.</p>		

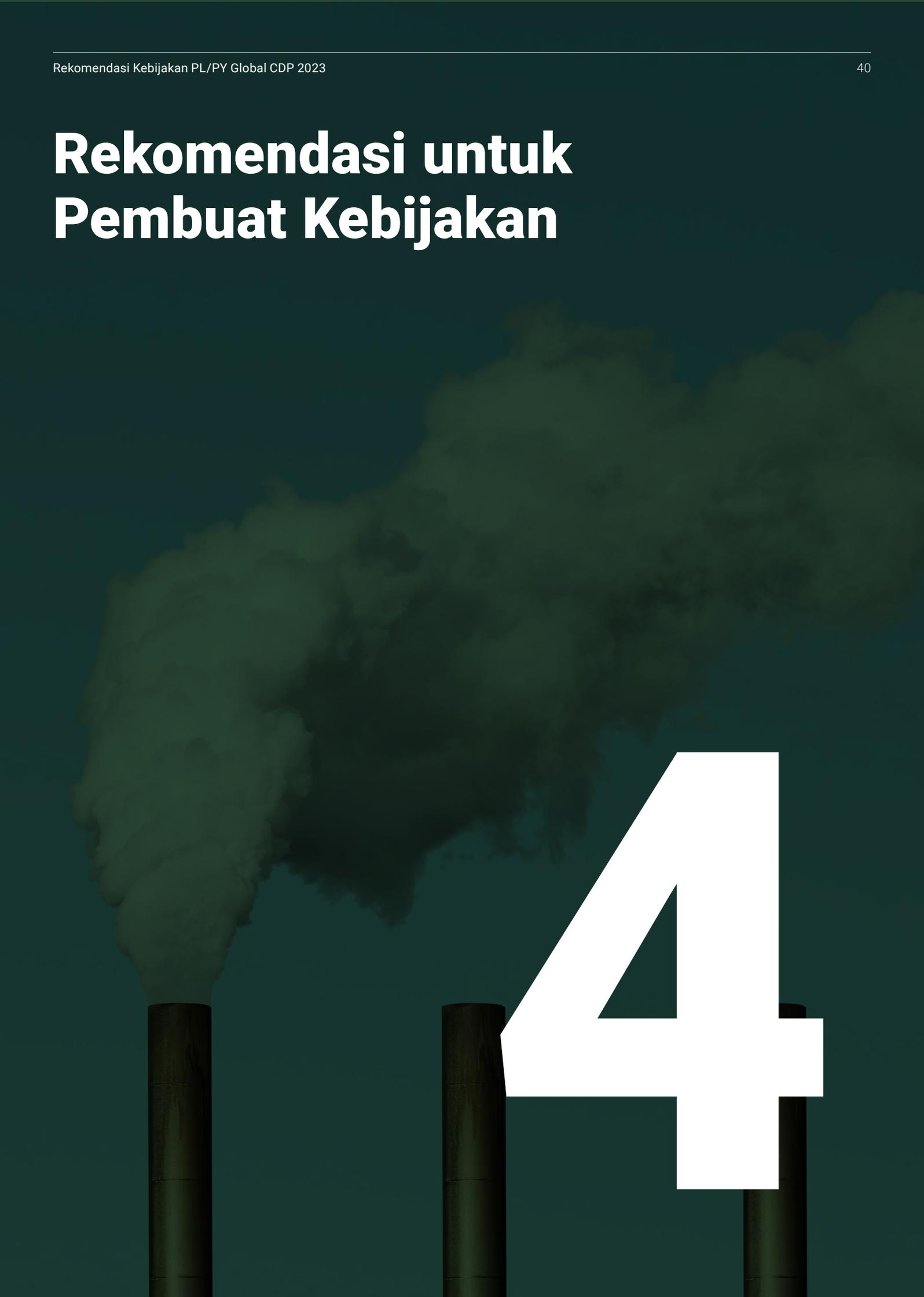
<sup>99</sup> <https://www.isealliance.org/get-involved/resources/making-credible-jurisdictional-claims-good-practice-guide-v11-2022>

<sup>100</sup> Mato Grosso State & PCI. Pembaruan tujuan strategis PCI untuk Mato Grosso – Visi Tahun 2030.

Unsur Struktural	Mato Grosso	Pará	Acre	Tocantins	Maranhão	Riau	Kalimantan Timur	Kalimantan Barat
 <p><b>Pembiayaan</b></p> <p>Inisiatif yurisdiksi telah menetapkan anggaran dan mendapatkan atau mengidentifikasi sumber daya yang cukup untuk menunjang pelaksanaan inisiatif yang tengah berlangsung, termasuk pemantauan kemajuan.</p>				<p>Tocantins belum memiliki program REDD+ yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. REDD+ dapat meningkatkan aliran modal guna mencapai tujuan CST. Segera setelah program REDD+ dirancang dan dijalankan, pemerintah dapat memperoleh akses terhadap dana yang disalurkan untuk perlindungan hutan.</p>	<p>1) Tidak diterapkannya Pajak Ekologis (ICMS Ecológico<sup>101</sup>). Maranhão merupakan salah satu negara bagian di Brasil yang tidak menerapkan pajak ekologis. Artinya, pemerintah kota yang memiliki kinerja lingkungan lebih baik tidak menerima kompensasi keuangan lebih tinggi dari pemerintah.</p> <p>2) Kurangnya pendanaan dari pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim dan penerapan inisiatif. Dana yang disalurkan secara khusus ini dapat mendukung proyek dan tujuan PL/PY, terutama dalam mengatasi perubahan iklim, mendorong praktik rantai pasok berkelanjutan, dan melindungi hutan. Makin banyak variasi mekanisme keuangan negara, makin besar pula kapasitas proyek PL/PY untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan memperoleh hasil jangka panjang yang lebih baik.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana terkait perubahan iklim yang secara tersirat didedikasikan untuk pendekatan yurisdiksi, tetapi masih belum cukup untuk mendanai seluruh kegiatan yang direncanakan seperti tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.</p>		<p>Tantangan terbesar pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi adalah rendahnya pendanaan, dan tidak adanya skema pendanaan multilateral atau bilateral yang mendukung upaya yang telah dilakukan Kalimantan Barat terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.</p>
 <p><b>Sistem Pemantauan</b></p> <p>Adanya suatu kerangka pemantauan terhadap perbaikan kinerja di tingkat lanskap, sekaligus kapasitas untuk mengelola dan menganalisis data, serta menyampaikan hasilnya secara akurat.</p>				<p>1) Tidak adanya platform monitoring dan evaluasi pendekatan yurisdiksi. Ketiadaan platform ini menyebabkan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja yurisdiksi, sehingga sulit untuk mempertahankan pelibatan signifikan dari pemangku kepentingan, khususnya investor dan perusahaan, yang biasanya memerlukan data terkini untuk pengambilan keputusan keuangan. Tidak adanya situs web yang tertata rapi juga turut menghambat strategi komunikasi inisiatif untuk menarik aliran modal ke wilayah tersebut.</p> <p>2) Kurangnya kapasitas untuk memvalidasi status kepatuhan lingkungan dari properti perdesaan di negara bagian ini. Validasi CAR sangat penting untuk perencanaan pemanfaatan lahan yang efektif dan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan. Sebanyak 85% dan 83% informasi properti perdesaan di Tocantins dan Maranhão masing-masing diklasifikasikan sebagai “tidak divalidasi”. Dengan validasi CAR yang lebih baik di tingkat negara, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap tujuan pendekatan yurisdiksi akan lebih mudah dilakukan.</p>		<p>Yurisdiksi telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk proyek tertentu dengan secara tersirat mengadopsi JA (baca: REDD+), yang dapat dipantau secara transparan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Namun, mekanisme monitoring yang ada saat ini belum terhubung dengan target hijau pemerintah daerah.</p>		

101 ICMS Ecológico adalah mekanisme pajak yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses dana pendapatan negara dalam nominal yang lebih besar dibandingkan dengan nominal alokasi semula. Akses ini dapat diberikan jika mereka membuktikan bahwa memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang mutakhir dan bermutu tinggi.

# Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan



4

# Rekomendasi untuk pembuat kebijakan

**Berdasarkan tantangan yang teridentifikasi, bagian berikut memaparkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh para pembuat kebijakan di seluruh dunia yang bercita-cita untuk mendukung pelaksanaan PL/PY.**

**1**

**Pemerintah harus mendukung pengakuan PL/PY secara tegas dan resmi dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan dan bekerja sama dalam menyusun definisi yang baku dan terpadu.**

Meskipun tindakan di tingkat yurisdiksi dan lanskap diakui secara tidak langsung sebagai hal yang signifikan dalam rezim lingkungan internasional, masih belum ada definisi PL/PY yang disepakati di tingkat multilateral maupun konsensus mengenai bentuk pendekatannya yang ideal. Meski demikian, PL/PY merupakan mekanisme menjanjikan yang dapat membantu pemerintah mengatasi pendekatan yang hanya berfokus pada satu persoalan, sehingga para pembuat kebijakan pun dapat mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati secara bersamaan. Guna memastikan agar PL/PY mendapatkan dukungan yang lebih luas, pemerintah harus mendukung pembangunan lebih lanjut dan adopsi skala besar atas definisi standar dan panduan normatif terkait perancangan dan pelaksanaan PL/PY. Definisi dan panduan ini harus diresmikan pada tingkatan tertinggi, oleh salah satu komite PBB atau dalam salah satu konvensi lingkungan PBB, misalnya UNFCCC atau CBD.

**2**

**Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan terhadap strategi yurisdiksi daerah dan kerangka tata kelola guna menerapkan PL/PY.**

Untuk mempercepat penerapan JA, diperlukan pengembangan kerangka kebijakan terpadu yang didorong oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta disusun dengan didasarkan pada kerja sama semua pemangku kepentingan. Kerangka ini sangat diperlukan untuk memastikan adanya koordinasi lintas sektor serta berkurangnya tumpang tindih dan konflik kepentingan antara otoritas publik pusat dan daerah. Dalam pengembangan kerangka kebijakan terpadu, perlu dipertimbangkan pula ditetapkannya JA dalam kerangka kebijakan yurisdiksi sebagai undang-undang, bukan hanya sebagai peraturan atau keputusan, guna memastikan agar program tetap berjalan jika terjadi perubahan kondisi politik. Dengan demikian, kesinambungan, kredibilitas, dan legitimasi pendekatan yurisdiksi dapat diperkuat, yang selanjutnya akan memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait, misalnya sektor swasta.



### 3 **Yurisdiksi harus menciptakan platform monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.**

Kredibilitas merupakan “salah satu faktor terpenting yang memengaruhi kemampuan yurisdiksi untuk menarik mitra yang mereka perlukan”<sup>102</sup>. Platform digital dapat mewujudkan transparansi saat menyoroti prinsip, kriteria, dan indikator untuk menilai praktik dan dampak terkait transisi menuju model pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah<sup>103</sup>. Hal ini juga membuat pemerintah bertanggung jawab atas tujuan kolektif yang telah ditetapkan, serta memberi data terkini bagi investor dan sektor swasta untuk pengambilan keputusan keuangan.



### 4 **Pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan pengungkapan melalui CDP untuk memastikan pelaporan kemajuan yang sesuai standar dan memfasilitasi diperolehnya pendanaan dari sektor swasta.**

Penting untuk menarik investor dan perusahaan baru yang tertarik mendanai inisiatif pembangunan di wilayah rendah karbon dengan upaya keberlanjutan sektor swasta. Untuk mencapai tujuan ini, kampanye komunikasi dan penjangkauan skala besar untuk mempromosikan PL/PY perlu dijalankan. Upaya CDP dapat menjadi katalisator mekanisme langsung dan tidak langsung untuk mendorong pendanaan ke dalam lanskap berkelanjutan dan yurisdiksi daerah. Mekanisme pengungkapan kami mendukung jalur PL/PY dengan mengarahkan pasar modal untuk mendorong dilakukannya pengungkapan PL/PY dan memberikan insentif kepada perusahaan dan pemerintah daerah untuk terlibat dalam PL/PY secara kredibel. Data yang dihasilkan dapat membantu melacak kemajuan dan tren global PL/PY serta memungkinkan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor pendorong dan peluang di balik PL/PY. Secara keseluruhan, data CDP dapat membantu para pembuat kebijakan merancang PL/PY dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan pelibatan sektor swasta dan menghubungkan inisiatif dengan kepentingan pasar dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berketahanan.

102 Stickler, CM, AE Duchelle, JP Ardila, DC Nepstad, OR David, C Chan, JG Rojas, R Vargas, TP Bezerra, L Pritchard, J Simmonds, JC Durbin, G Simonet, S Peteru, M Komalasari, ML DiGiano, MW Warren. 2018. [The State of Jurisdictional Sustainability, p.9](#). San Francisco, USA: Earth Innovation Institute/Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research/ Boulder, USA: Governors' Climate & Forests Task Force Secretariat.

103 Stickler, CM, AE Duchelle, JP Ardila, DC Nepstad, OR David, C Chan, JG Rojas, R Vargas, TP Bezerra, L Pritchard, J Simmonds, JC Durbin, G Simonet, S Peteru, M Komalasari, ML DiGiano, MW Warren. 2018. [The State of Jurisdictional Sustainability, p.9](#). San Francisco, USA: Earth Innovation Institute/Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research/ Boulder, USA: Governors' Climate & Forests Task Force Secretariat.



## **5 Pemerintah pusat dan daerah harus merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan insentif keuangan yang dapat membiayai yurisdiksi dan lanskap dalam jangka panjang.**

Memanfaatkan berbagai sumber pendanaan tambahan dan menghubungkan proyek dengan mekanisme ekonomi dan keuangan penting dilakukan. Kesenjangan pendanaan yang ada harus diidentifikasi dan dikomunikasikan oleh pemerintah daerah dan pengembang program nonpemerintah. Para pembuat kebijakan perlu memastikan agar kesenjangan pendanaan yang teridentifikasi dapat diatasi dengan cepat untuk membantu yurisdiksi memperoleh aliran modal yang lebih besar untuk kebijakan lingkungan yang berfokus pada peningkatan tingkat berkelanjutan sosial-lingkungan di yurisdiksi tersebut. Mekanisme ekonomi dan keuangan dapat mencakup penerapan pajak ekologis untuk mentransfer lebih banyak kas ke yurisdiksi dengan kinerja lingkungan baik hingga pengembangan program REDD+ atau pembayaran lainnya untuk jasa lingkungan yang diatur berdasarkan undang-undang.



## **6 Partisipasi kelompok sosial yang kurang berpengaruh, seperti pengguna lahan setempat dan pemilik lahan, dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek harus diperhatikan.**

Guna mewujudkan indikator pembangunan berkelanjutan dan tujuan makro JA, pemerintah daerah harus merancang dan memberlakukan perjanjian ekonomi sektoral skala luas yang melibatkan sektor ekonomi utama. Perjanjian ini juga menekankan diikutsertakannya berbagai kelompok yang memiliki pengaruh tidak terlalu besar dalam proses pengambilan keputusan (misalnya, masyarakat adat, masyarakat setempat, NGO, dan pelaku UKM). Hal ini berlaku terutama untuk kasus di mana beberapa komoditas menjadi penggerak utama deforestasi dan sejumlah kecil pelaku memusatkan banyak kekuatan politik. Penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat tradisional dan masyarakat adat dilindungi, dan mereka menerima manfaat sosial-ekonomi dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya dan jasa lingkungan yang dipertahankannya.

# Lampiran



5

## Lampiran I: Referensi terkait PL/PY dari perjanjian internasional mengenai lingkungan

Perjanjian Internasional	Di bagian mana istilah terkait PL/PY disebutkan?	Deskripsi	Pesan khusus untuk sektor swasta?
<a href="#">UNFCCC 1992</a>	<b>Pasal 4(1e) Komitmen</b>	"Bekerja sama dalam mempersiapkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; mengembangkan dan menguraikan rencana yang tepat dan terpadu untuk pengelolaan wilayah pesisir, sumber daya air dan pertanian, dan perlindungan dan rehabilitasi wilayah, terutama di wilayah Afrika, yang terdampak kekeringan, penggurunan, dan banjir.	
<a href="#">Persetujuan Paris</a>	<b>Pasal 5(2)</b>	"Para Pihak diimbau mengambil tindakan untuk mengimplementasikan dan mendukung, termasuk melalui sistem pembayaran berbasis hasil, kerangka kerja yang ada sebagaimana ditetapkan dalam pedoman dan keputusan terkait yang telah disepakati menurut konvensi untuk: pendekatan kebijakan dan insentif positif bagi kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peran konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang; serta pendekatan kebijakan alternatif, seperti pendekatan bersama untuk mitigasi dan adaptasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan terpadu, (...)"	
	<b>Pasal 6(8)</b>	Para Pihak menyadari pentingnya pendekatan nonpasar yang terpadu, holistik, dan seimbang serta tersedia bagi para pihak untuk membantu implementasi NDC, (...)	Pendekatan ini harus bertujuan untuk "meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta dalam penerapan NDC"
<a href="#">CBD 1992</a>	<b>Pasal 6 (b) Langkah Umum untuk Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan (General Measures for Conservation and Sustainable Use)</b>	Mengintegrasikan, sejauh mungkin dan dengan sesuai, konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ke dalam rencana, program, dan kebijakan sektor atau lintas sektor yang relevan.	
<a href="#">CBD</a>	<b>Kerangka Kerja Utama untuk Tindakan (Primary Framework for Action)</b>	Pendekatan ekosistem merupakan strategi untuk pengelolaan terpadu sumber daya tanah, air, dan hayati yang mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dengan cara yang adil, (...) Sebagaimana dijelaskan oleh Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties), pendekatan ekosistem merupakan kerangka kerja utama untuk tindakan berdasarkan Konvensi tersebut.  <a href="#">Panduan operasional</a> untuk menerapkan pendekatan ekosistem mencakup (1) fokus pada hubungan dan proses di dalam ekosistem, (2) meningkatkan pembagian manfaat, (3) menerapkan praktik pengelolaan yang adaptif, (4) melaksanakan tindakan pengelolaan pada skala yang sesuai dengan permasalahan yang tengah ditangani, dengan desentralisasi hingga ke tingkat terendah, sebagaimana mestinya, dan (5) memastikan adanya kerja sama antarsektor (...)	<a href="#">Prinsip 12</a> untuk menerapkan pendekatan ekosistem secara garis besar harus melibatkan semua sektor masyarakat dan disiplin ilmu yang relevan.
<a href="#">Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)</a>	<b>Target 2</b>	"Memastikan setidaknya 20% ekosistem air tawar, laut, dan darat sedang direstorasi, memastikan konektivitas di antara ekosistem tersebut, dan berfokus pada ekosistem prioritas." – memastikan konektivitas fungsi dan jasa di seluruh ekosistem dan pemanfaatan lahan merupakan alasan utama fokus di skala lanskap. Selain itu, PL/PY selalu menyertakan tindakan restorasi di area yang terdegradasi.	
	<b>Target 3</b>	"Memastikan agar setidaknya 30% wilayah daratan dan lautan di seluruh dunia, khususnya di area yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kontribusinya pada manusia, dilindungi melalui sistem kawasan lindung yang dikelola secara efektif dan merata, mewakili ekologi dan terhubung dengan baik serta langkah konservasi berbasis wilayah lainnya yang efektif dan terintegrasi ke dalam lanskap daratan dan lautan yang lebih luas." - Secara khusus menyebutkan bahwa upaya konservasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan bentang laut yang lebih luas dan aspek sosialnya, yang merupakan dasar dan prinsip PL/PY.	
	<b>Target 8</b>	"Meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati, berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi melalui pendekatan berbasis ekosistem, dengan berkontribusi setidaknya 10 GtCO2e per tahun terhadap upaya mitigasi global, dan memastikan agar semua upaya mitigasi dan adaptasi dapat mencegah dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati." – Pendekatan berbasis ekosistem dianggap sebagai padanan LA dengan lanskap yang didefinisikan secara ekologis. Selain itu, di negara-negara belahan bumi selatan, JREDD+ dengan tujuan pendekatan yurisdiksi yang lebih luas memiliki peran utama untuk mengartikulasikan agenda iklim dan keanekaragaman hayati di tingkat yurisdiksi daerah.	
	<b>Target 14</b>	"Memadukan nilai-nilai keanekaragaman hayati sepenuhnya ke dalam kebijakan, peraturan, perencanaan, proses pengembangan, strategi pengentasan kemiskinan, pemerincian, dan penilaian dampak lingkungan di seluruh tingkat pemerintahan dan di seluruh sektor ekonomi, memastikan agar semua kegiatan dan aliran keuangan sesuai dengan nilai keanekaragaman hayati." - Seluruh tingkat pemerintahan mencakup yurisdiksi daerah (memberikan peran kepada JA untuk memfasilitasi tindakan keanekaragaman hayati di tingkat nasional sampai lokal). Semua pelaku ekonomi di seluruh sektor PL/PY mencakup berbagai sektor ekonomi.	
	<b>Target 15</b>	"Semua badan usaha (publik dan swasta, besar, menengah, dan kecil) menilai dan melaporkan keberagamaan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, dari tingkat daerah hingga global, dan secara progresif mengurangi dampak negatif sekurangnya setengah dan meningkatnya dampak positifnya, mengurangi risiko terkait keanekaragaman hayati bagi badan usaha dan bergerak menuju keberlanjutan sepenuhnya dalam praktik-praktik ekstraksi dan produksi, pengadaan dan rantai pasok, serta penggunaan dan pembuangan." - Keterlibatan perusahaan dalam PL/PY harus terus berlanjut dalam menunjukkan dampak positifnya terhadap keanekaragaman hayati.	Target keanekaragaman hayati terhubung langsung dengan perusahaan dan sektor swasta
	<b>Target 21</b>	"Memastikan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat setempat secara adil dan efektif dalam pengambilan keputusan terkait keanekaragaman hayati, dan menghormati hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya, serta perempuan, anak-anak, dan pemuda." - Kondisi sosial, kesejahteraan masyarakat, pemangku kepentingan, dan proses tata kelola tidak hanya ditingkatkan dalam PL/PY tetapi juga dalam prinsip dan unsur keberhasilan.	

International Agreement	Where are LA/JA-related terms mentioned?	Details	Specific mentions to the private sector?
<a href="#">Agenda Tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan</a>	Ayat 2	Kami menyadari bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem, merupakan tantangan global terbesar dan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi pembangunan yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara seimbang dan terpadu.	Dokumen ini mengakui peranan beragam sektor swasta, dari usaha kecil, koperasi, hingga perusahaan multinasional, (...) dalam pelaksanaan agenda tersebut. Agenda ini mendorong dan mendukung kemitraan multipemangku kepentingan, seperti kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta yang memobilisasi dan membagikan pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.
	Ayat 11	Tantangan dan komitmen yang terkandung dalam konferensi dan pertemuan besar PBB ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi terpadu. (...)	
	Ayat 55	SDG dan semua targetnya terintegrasi dan tidak terpisahkan, bersifat global, dan berlaku secara universal (...).	
	SDG 2.4	Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan melaksanakan praktik pertanian berketahanan yang dapat meningkatkan produktivitas dan hasil, yang membantu menjaga ekosistem dan memperkuat kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif meningkatkan kualitas lahan dan tanah.	
	SDG 6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkat, termasuk melalui kerja sama lintas negara sebagaimana diperlukan.	
	SDG 15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, pemerincian dan strategi pengurangan kemiskinan.	
<a href="#">UNCCD</a>	Paragraf 1 Bagian Pengantar	Upaya mengatasi penggurunan/degradasi lahan dan kekeringan akan melibatkan strategi terpadu jangka panjang yang secara bersamaan berfokus pada perbaikan produktivitas lahan dan rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya tanah dan air secara berkelanjutan.	Kerangka penerapan menguraikan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan kemitraan publik-swasta dan perjanjian inovatif.
	Tujuan Strategis 1	Memperbaiki kondisi ekosistem terdampak, memerangi penggurunan/degradasi lahan, mendukung pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap netralitas degradasi lahan.	
<a href="#">Deklarasi Para Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan (Glasgow Leader's Declaration on Forests and Land Use)</a>	Pengantar	Kami, para pemimpin negara yang disebutkan di bawah ini: Menekankan peran penting dan saling bergantungnya segala jenis hutan, keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan agar dunia dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.	Tujuan 5 menyatakan bahwa penanda tangan perjanjian berkomitmen untuk secara signifikan meningkatkan keuangan dan investasi dari berbagai sumber publik dan swasta.
	Tujuan 6	Memfasilitasi penyelarasan arus keuangan dengan tujuan internasional untuk memulihkan hilang dan terdegradasinya hutan, sekaligus memastikan diberlakukannya kebijakan dan sistem yang kokoh untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berketahanan dan mendorong pencapaian tujuan hutan, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, keanekaragaman hayati, dan iklim.	
<a href="#">Deklarasi New York tentang Hutan (NYDF)</a>	Tujuan	Memberikan penghargaan kepada negara dan yurisdiksi yang melakukan tindakan pengurangan emisi hutan serta melestarikan dan meningkatkan kualitas hutan, terutama melalui kebijakan publik untuk meningkatkan pembiayaan bagi pengurangan emisi yang terverifikasi dan pembelian komoditas oleh sektor swasta.	Secara keseluruhan, penanda tangan NYDF terdiri dari pemangku kepentingan publik dan swasta yang bersama-sama berkomitmen dengan berbagai kewajiban, kemampuan, dan situasi untuk menjalankan perannya dalam mencapai tujuan NYDF dalam kemitraan, termasuk dengan memastikan diberikannya insentif ekonomi berskala besar dan kuat sepadan dengan besarnya tantangan yang ada.

## Lampiran II: Mekanisme yang terdapat dalam perjanjian lingkungan internasional memengaruhi penerapan PL/PY

Perjanjian Internasional	Bagaimana kerangka kerja ini dapat memengaruhi adopsi PL/PY?	Deskripsi
<a href="#">UNCCD</a>	<b>Pendampingan teknis dan ilmiah</b>	Science Policy Interface (SPI) memberikan bukti berbasis ilmu pengetahuan mengenai potensi kontribusi Tata Guna Lahan Terpadu (Integrated Land Use Planning/ILUP) dan Pengelolaan Lanskap Terpadu (Integrated Land Management/ILM) terhadap perubahan transformatif positif untuk mencapai Netralitas Degradasi Lahan (Land Degradation neutrality/LDN) dan mengatasi persoalan pengurusan/degradasi lahan dan kekeringan. <a href="#">Laporan ini</a> memberikan gambaran analitis mengenai alat bantu dan pendekatan yang umum digunakan, atau yang dapat digunakan, untuk mendukung perencanaan ILUP dan ILM, serta mengidentifikasi cara agar alat bantu dan pendekatan tersebut dapat membantu mencapai target LDN. Selain itu, kertas kerja/working paper yang diterbitkan UNCCD dan dibuat oleh mitra eksternal menilai <a href="#">ILM sebagai cara yang paling layak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan</a> , atau <a href="#">peran restorasi ekologis untuk rehabilitasi lanskap produksi</a> dengan pendekatan terpadu.
<b>UNCCD</b>	<b>Pengembangan kapasitas</b>	<a href="#">Tinjauan Dunia mengenai Pendekatan dan Teknologi Konservasi (World Overview of Conservation Approaches and Technologies/WOCAT)</a> . Tinjauan Dunia mengenai Pendekatan dan Teknologi Konservasi (World Overview of Conservation Approaches and Technologies/WOCAT) merupakan sebuah konsorsium lembaga yang mendukung adopsi, adaptasi, diseminasi, dan pengarusutamaan Pengelolaan Lahan secara Berkelanjutan (Sustainable Land Management/SLM) serta membagi praktik terbaik SLM ke negara-negara anggota UNCCD. Tujuan konsorsium ini adalah membantu pengguna lahan dan masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa ekosistem yang aman dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat. WOCAT telah mengembangkan basis data dengan lebih dari 500 studi kasus tentang Teknologi (kegiatan yang dilakukan di lapangan) dan lebih dari 250 Pendekatan (strategi, atau lingkungan pendukung, yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dengan benar), serta data geografis (peta degradasi dan SLM di berbagai skala). WOCAT, yang telah diakui secara resmi oleh UNCCD, memiliki mandat untuk mendukung 196 negara penanda tangan dalam mencatat praktik terbaik SLM dan menggunakan pengetahuan SLM dari para pemangku kepentingan di seluruh dunia, dari pengguna lahan hingga pengambil keputusan, guna menyempurnakan pengelolaan lahan di tingkat daerah. Pada tahun 2020, Kemitraan UNCCD-WOCAT diperpanjang untuk meningkatkan penerapan praktik SLM di seluruh dunia melalui kemitraan global yang telah diperkuat. Basis data tersebut terdiri dari beberapa proyek yang dapat ditemukan ketika mencari 'lanskap terpadu', 'pendekatan lanskap', atau 'pendekatan ekosistem'.
<b>UNCCD</b>	<b>Pengembangan kapasitas</b>	UNCCD mengembangkan <a href="#">Pusat Pengetahuan</a> yang menyertakan publikasi mengenai ILM, seperti <a href="#">publikasi berikut</a> dengan panduan kebijakan publik di dalamnya.
<b>UNFCCC</b>	<b>Bantuan teknis dan ilmiah</b>	Secara teknis, UNFCCC juga menganalisis hasil REDD+ yang telah disampaikan pada <a href="#">Platform Web REDD+ UNFCCC</a> dan memverifikasi pengurangan dan penghapusan karbon. Selain itu, informasi mengenai pembayaran berbasis hasil yang telah ditransfer atas pengurangan terverifikasi dari Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund/GCF), Pemerintah Norwegia, Jerman, dan Inggris, akan dipublikasikan dalam <a href="#">Pusat Informasi REDD+ Lima</a> . Baru-baru ini, platform <a href="#">REDD.plus</a> didirikan oleh Koalisi Negara Hutan Hujan (Coalition for Rainforest Nations). Pada laman ini, pengurangan dan penghapusan karbon, yang diverifikasi oleh UNFCCC dan terdaftar dalam Persetujuan Paris di Pusat Informasi REDD+ dapat dibeli oleh para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan swasta.
<b>UNFCCC</b>	<b>Dukungan finansial</b>	<a href="#">Green Climate Fund (GCF)</a> adalah mekanisme pendanaan yang dibentuk dalam kerangka kerja UNFCCC, entitas operasional tim Mekanisme Keuangan (Financial Mechanism) guna membantu negara berkembang dalam praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Tujuan GCF adalah "mendukung proyek, program, kebijakan, atau kegiatan lainnya di pihak negara berkembang menggunakan jendela pendanaan tematik". Hal ini dimaksudkan agar GCF menjadi pusat dari upaya meningkatkan pendanaan iklim di bawah UNFCCC. Secara keseluruhan, ada 10 proposal pendanaan yang disetujui yang dapat ditemukan ketika mencari 'pendekatan lanskap'. Judul proyek secara eksplisit mengacu ke 'pendekatan adaptasi berbasis ekosistem', 'lanskap berkelanjutan', 'pendekatan terpadu', dan 'pengelolaan lanskap berbasis masyarakat'. Selain itu, laman web ini juga mencantumkan 13 proyek REDD+ yang tengah dalam proses pelaksanaan.
<b>UNFCCC</b>	<b>Panduan normatif</b>	Keputusan resmi UNFCCC dalam konteks JREDD+ terkait, misalnya, cara untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan karbon, pengembangan tingkat emisi rujukan hutan, dan perlindungan.
<b>UNFCCC</b>	<b>Pengembangan kapasitas</b>	Penyelenggaraan lokakarya lintas profesi mengenai <a href="#">Pengelolaan tanah dan air, termasuk strategi pengelolaan daerah aliran sungai, guna menjamin ketahanan pangan</a> .

Perjanjian Internasional	Bagaimana kerangka kerja ini dapat memengaruhi adopsi PL/PY?	Deskripsi
UNFCCC	Pengembangan kapasitas	<a href="#">Portal Pengetahuan Adaptasi</a> (Adaptation Knowledge Portal) merupakan wadah daring bagi <a href="#">UNFCCC Knowledge-to-Action Hub for Climate Adaptation and Resilience</a> (juga disebut sebagai Program Kerja Nairobi (Nairobi Work Programme/NWP)). NWP menanggapi kebutuhan akan pengetahuan yang diidentifikasi oleh Para Pihak dan kebutuhan yang muncul dari pelaksanaan kerangka adaptasi Cancun serta kelompok kerja dan badan lain yang relevan di dalam Konvensi ini. Portal ini menyediakan akses gratis dan terbuka sebagai sumber daya pengetahuan adaptasi. Selain itu, portal ini juga menyajikan informasi mengenai pekerjaan NWP, jaringannya di lebih dari 400 organisasi mitra terkemuka dan beragam, serta peluang pelibatannya. Basis data yang ada berisikan beberapa dokumen mengenai adaptasi berbasis ekosistem, misalnya <a href="#">laporan sintesis</a> yang diterbitkan Sekretariat UNFCCC, laporan <a href="#">lokakarya teknis</a> , ringkasan kebijakan, atau laporan ilmiah.
CBD, UNFCCC, dan UNCCD	Dukungan finansial	<a href="#">Global Environment Facility (GEF)</a> berfungsi sebagai mekanisme keuangan bagi CBD, UNFCCC, dan UNCCD. Pendanaan GEF mendorong pendekatan terpadu. Strategi GEF 2020 yang baru menekankan perlunya mendukung perubahan transformatif dan mencapai dampak pada skala yang lebih luas. Strategi ini mengimbau agar GEF berfokus pada penyebab degradasi lingkungan dan membahas pentingnya mendukung koalisi yang luas dari para pemangku kepentingan yang berkomitmen, serta kegiatan yang inovatif dan terukur. Tiga program yang ada (Membina Keberlanjutan dan Ketahanan untuk Ketahanan Pangan di Afrika Sub-Sahara, Kota Berkelanjutan, dan Menghapus Deforestasi dari Rantai Pasok Komoditas) akan menguji pelaksanaan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengatasi beragam tantangan lingkungan global secara diskret dan terjadwal. Pada sektor komoditas, GEF dan UNDP meluncurkan <a href="#">Kemitraan Pertumbuhan yang Baik (Good Growth Partnership/GGP)</a> senilai 500 juta dolar AS pada tahun 2017. Kemitraan ini telah menerapkan pendekatan terpadu di Brasil, Paraguay, Liberia, dan Indonesia. Hingga saat ini, GGP telah berkontribusi pada pembentukan 13 platform multipemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional yang dipimpin oleh pemerintah, yang berkomitmen untuk mengesahkan dan melaksanakan rencana aksi jangka panjang untuk menghasilkan minyak sawit, daging sapi, dan kedelai yang berkelanjutan.
CBD	Panduan normatif	CBD menyediakan <a href="#">panduan operasional</a> dan <a href="#">prinsip</a> untuk penerapan pendekatan ekosistem sebagai kerangka utama pelaksanaan tindakan.
CBD	Pengembangan kapasitas	CBD menyediakan <a href="#">basis data</a> mengenai studi kasus menggunakan pendekatan ekosistem, <a href="#">buku sumber pendekatan ekosistem</a> yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek menggunakan pendekatan ekosistem, dan <a href="#">buletin elektronik pendekatan ekosistem</a> . Selain itu, <a href="#">laporan sintesis</a> lokakarya teknis CBD juga menyajikan data terkait Pendekatan berbasis Ekosistem (Ecosystem-based Adoption/EbA).
Agenda Tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan kapasitas	Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (The Global Partnership for Sustainable Development) 'direvitalisasi' di dalam Agenda Tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Kemitraan ini bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan global yang intensif dalam mendukung penerapan semua tujuan dan target, menghimpun pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB, dan aktor lainnya serta memobilisasi semua sumber daya yang tersedia. <a href="#">Platform Kemitraan</a> ini berisikan 6.740 proyek komitmen sukarela dan kemitraan multipemangku kepentingan yang dibuat untuk mendukung penerapan SDG. Ketika menggunakan istilah pencarian 'pendekatan yurisdiksi' dan 'pendekatan lanskap', dapat ditemukan 40 proyek (0,6%) terkait istilah tersebut. Dari 40 proyek tersebut, setidaknya ada 15 proyek yang tidak ditujukan untuk mengelola sistem pemanfaatan lahan, sehingga hanya 0,4% proyek terdaftar yang kemungkinan relevan dengan PL/PY.
Agenda Tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan kapasitas	<a href="#">Pusat Pengetahuan SDG (SDG Knowledge Hub)</a> menyajikan berita, artikel tamu, ringkasan kebijakan, dan acara terkait pelaksanaan Agenda PBB Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk 17 SDG. Untuk SDG 15, konten yang diterbitkan dengan jelas mengacu pada pendekatan lanskap, pendekatan ekosistem, pengelolaan lahan secara Berkelanjutan, atau REDD+. Untuk Pendekatan Lanskap, pusat pengetahuan ini berisi satu ringkasan kebijakan, empat artikel tamu, dan sejumlah besar artikel berita.
Deklarasi Para Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan	/	/

## Lampiran III: Inisiatif transnasional yang dipimpin oleh organisasi internasional, regional, atau nasional, dan pemerintah yang membina dan membantu perancangan dan pelaksanaan PL/PY

Pemangku Kepentingan	Nama Inisiatif	Pelaksanaan PL/PY	Kemajuan hingga saat ini	Pelibatan sektor swasta
	<b>PROGREEN</b>	Dana Perwalian Multidonor (Multi-Donor Trust Fund) yang mendukung upaya negara meningkatkan penghidupan sekaligus mengatasi berkurangnya keanekaragaman hayati, hilangnya hutan, memburuknya kesuburan tanah, dan meningkatnya risiko seperti kebakaran hutan tak terkendali, yang diperparah dengan perubahan iklim. Melalui pendekatan lanskap terintegrasi, PROGREEN bertujuan untuk membantu negara mencapai tujuan dan komitmen pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan global, termasuk pengentasan kemiskinan, dengan cara yang hemat biaya. Pilar 1 bertujuan untuk meningkatkan luas lahan yang dikelola secara terpadu guna meningkatkan penghidupan, mendukung pengembangan ekonomi, serta menjaga dan merestorasi jasa ekosistem. Pilar 2 bertujuan untuk mengurangi kebutuhan mengonversi lahan menjadi lahan pertanian melalui pengelolaan lahan pertanian yang terpadu. Pilar 3 bertujuan untuk mengurangi perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh berbagai sektor selain pertanian, misalnya infrastruktur, pertambangan, dan transportasi.	Pada bulan Agustus 2020, Partnership Council menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dana untuk PROGREEN. Rencana ini mendukung program di Argentina, Ethiopia, dan Ghana, serta program regional di Asia Tengah, Oasis Afrika Utara, dan Sahel.	Sebagai program dengan tema lintas sektor, PROGREEN memiliki tujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan investasi sektor swasta dalam mengurangi deforestasi dan hilangnya habitat. Melalui analisis mendalam dan penyuluhan, PROGREEN akan mengidentifikasi dan mendukung peningkatan investasi sektor swasta dalam berbagai proyek dan rantai nilai.
<b>Bank Dunia</b>	<b>Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes/ BioCF-ISFL)</b>	Berbekal pengalaman dari BioCarbon Fund selama lebih dari 15 tahun, ISFL saat ini tengah menyusun portofolio berbagai program yang akan mendorong praktik pertanian, kehutanan, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan lebih cerdas melalui pendekatan terpadu. ISFL menyadari diperlukannya alat dan pendekatan baru untuk mengatasi deforestasi, perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan momentum di tingkat internasional, nasional, dan daerah, pendekatan pemanfaatan lahan yang cerdas bagi iklim, yang diterapkan di sektor pertanian, kehutanan, dan pemanfaatan lahan lainnya (AFOLU), menawarkan solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam persoalan deforestasi dan perubahan pemanfaatan lahan. ISFL berupaya mengusung pendekatan ini ke lini terdepan, menghimpun para pemangku kepentingan, serta menyebarluaskan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik.	ISFL telah berjalan sejak tahun 2013. Saat ini, ISFL memberikan dukungan untuk berbagai program di Kolombia, Ethiopia, Indonesia, Meksiko, dan Zambia. Hasil berbagai program di setiap negara dapat dilihat di daftar yang disediakan.	Pelibatan sektor swasta merupakan salah satu dari empat pilar utama ISFL.
	<b>Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF)</b>	FCPF mendukung upaya REDD+ melalui Dana Kesiapan (Readiness Fund) dan Dana Karbon (Carbon Fund) yang disediakannya. Dana Kesiapan FCPF membantu banyak negara menyiapkan unsur pokok pelaksanaan REDD+. Dana ini juga ditujukan untuk merancang strategi REDD+ nasional, mengembangkan tingkat emisi rujukan, merancang sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta menyiapkan pengaturan pengelolaan REDD+ nasional, termasuk upaya perlindungan lingkungan dan sosial yang tepat. Semua negara yang ingin memperoleh pendanaan dari Carbon Fund harus mengikuti rancangan program REDD+ sesuai dengan Kerangka Metodologis Carbon Fund FCPF.	FCPF yang diluncurkan pada tahun 2008 bekerja sama dengan 47 negara. Dari jumlah ini, hanya 15 negara yang menyelesaikan program REDD+ dan memperoleh pendanaan dari Carbon Fund. Hingga saat ini, hanya satu negara yang telah menerima pembayaran dana dari Carbon Fund untuk pengurangan emisi ( <a href="#">Laporan Tahunan 2021</a> ).	Sejauh ini, BP Technology Ventures adalah satu-satunya entitas sektor swasta yang memberikan pendanaan untuk Carbon Fund.
<b>Norwegia melalui Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (Norway's International Climate and Forests Initiative/NICFI), Inggris, Amerika Serikat, dan perusahaan seperti Amazon, Bayer, Unilever, dan lainnya.</b>	<b>Lowering Emissions by Accelerating Forest finance (LEAF)</b>	Tujuan Koalisi ini adalah menghentikan deforestasi dengan mendanai upaya perlindungan hutan tropis secara luas di berbagai negara atau negara bagian dan provinsi (yurisdiksi) melalui program yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat adat dan masyarakat setempat.	Pada tahun 2021, koalisi ini berhasil menggalang dana sebesar 1 miliar dolar.	Inisiatif kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta
<b>Anggota pendiri Koalisi ini mencakup negara bagian California, Illinois (AS), Amapá, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Acre (Brasil), Aceh, dan Papua (Indonesia)</b>	<b>Gugus Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan (Governors' Climate and Forests Task Force/GCF-TF)</b>	GCF-TF adalah kolaborasi pemerintah daerah yang terdiri dari 39 negara bagian dan provinsi. Secara garis besar, GCF-TF bertujuan untuk mengurangi deforestasi melalui pendekatan yurisdiksi, mendorong tata kelola lingkungan yang baik, meningkatkan pembiayaan hijau, melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, serta memajukan jalur pembangunan rendah emisi. GCF-TF menandatangani Deklarasi Rio Branco pada tahun 2014. Para penanda tangan deklarasi ini menyatakan komitmen untuk mengurangi deforestasi sebesar 80% pada tahun 2020 di negara bagian dan provinsi masing-masing. Pendanaan yang diberikan kepada anggota GCF-TF bertujuan untuk mendukung negara bagian dan provinsi untuk mengembangkan strategi yurisdiksi yang ditargetkan dan rencana investasi untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi melalui kerja sama dengan mitra masyarakat sipil. Aliran pendanaan lainnya mendukung intervensi yurisdiksi yang strategis.	Dari tahun 2017 hingga 2020, ada 35 negara bagian dan provinsi berhutan tropis anggota GCF-TF yang menyusun dan memperbarui strategi yurisdiksi serta rencana investasi untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi.	GCF-TF mendorong kemitraan dengan para pemangku kepentingan sektor publik dan swasta di berbagai tingkatan, termasuk para pemimpin bisnis dan rantai pasok hingga masyarakat adat dan masyarakat setempat.
<b>Forum Barang Konsumen (Consumer Goods Forum/CGF)</b>	<b>Forest Positive Coalition of Action</b>	Koalisi ini dipelopori oleh 21 perusahaan dengan nilai pasar gabungan sekitar 2 triliun dolar AS, dengan tujuan untuk meningkatkan tindakan bersama dan mempercepat upaya sistemis dalam menghentikan deforestasi, degradasi hutan, dan konversi dari rantai pasok komoditas utama, sekaligus mendukung pengelolaan, konservasi, dan restorasi hutan secara berkelanjutan. Tujuan koalisi ini adalah menerapkan PL/PY untuk menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk konservasi, restorasi, dan peningkatan mata pencaharian setempat (di luar dari rantai pasoknya dan dalam skala besar) melalui kolaborasi dan inovasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Terdapat 4 unsur utama dari strategi baru yang dipublikasikan pada tahun 2021, yaitu: beralih dari bisnis bebas deforestasi ke bisnis yang positif terhadap hutan; mengubah komitmen menjadi tindakan; memperluas upaya di luar rantai pasoknya sendiri untuk menyertakan pemasok dan lanskap yang lebih luas; serta memaksimalkan dampak bersama melalui Aksi Koalisi.	Lihat berbagai pencapaian di <a href="#">sini</a> , termasuk publikasi peta jalan untuk sektor <a href="#">Sawit</a> , <a href="#">Kedelai</a> , dan <a href="#">Pulp &amp; Kertas</a> , ataupun peluncuran <a href="#">Ambisi Pelibatan Lanskap</a> (Landscape Engagement Ambition) untuk melakukan transformasi lanskap produksi.	Dipimpin sektor swasta

Pemangku Kepentingan	Nama Inisiatif	Pelaksanaan PL/PY	Kemajuan hingga saat ini	Pelibatan sektor swasta
FAO, UNDP, dan UNEP	Program REDD PBB	Upaya global Program REDD PBB dalam pendekatan dan perencanaan lanskap bertujuan untuk menyatukan berbagai pengalaman dalam perencanaan tata guna lahan/tata ruang, baik melalui kegiatan alih bagi pengetahuan maupun melalui produk pengetahuan.	Sudah ada <a href="#">laporan</a> yang dipublikasikan mengenai alat untuk menyusun perencanaan pemanfaatan lahan terpadu untuk pelaksanaan REDD+, <a href="#">ringkasan informasi</a> , atau <a href="#">tutorial penggunaan SIG</a> yang dikembangkan untuk membantu negara pelaksana program REDD+ dalam melakukan analisis spasial.	
Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) (didanai oleh GEF)	Program Dukungan Global Rencana Adaptasi Nasional ( <i>National Adaptation Plan Global Support Programme/NAP-GSP</i> )	Sesuai dengan Kerangka Adaptasi Cancun (Cancun Adaption Framework), Rencana Adaptasi Nasional disusun untuk mengidentifikasi kebutuhan adaptasi dan menyiapkan rencana aksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam Persetujuan Paris Pasal 7, disebutkan bahwa negara-negara diminta membuat untuk menyusun Rencana Adaptasi Nasional, jika diperlukan. Sebagai suatu kegiatan pada NAP-GSP, UNEP diminta untuk menyusun Pedoman Tambahan untuk Mengintegrasikan Pendekatan berbasis Ekosistem (Ecosystem-based Approach/EbA) ke dalam Rencana Adaptasi Nasional. Pedoman ini akan menjadi bahan diskusi UNFCCC dan membantu setiap negara memahami alasan, sektor, waktu, dan cara EbA diintegrasikan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional.	<a href="#">Pedoman tambahan</a> untuk Panduan Teknis Rencana Adaptasi Nasional UNFCCC mengenai pengintegrasian EbA ke dalam Rencana Adaptasi Nasional sudah diterbitkan.	
FAO		"Pengelolaan lanskap terpadu untuk jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati" merupakan satu dari tiga alur kerja dalam Program Strategis 2 FAO mengenai jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati. Divisi Tanah dan Air FAO adalah penanggung jawab utama pengelolaan lanskap terpadu.	Sebagai bagian dari tugasnya, FAO melaksanakan, misalnya, proyek yang didanai GEF mengenai pengelolaan lanskap terpadu dan <a href="#">menerbitkan laporannya</a> .	
Inisiatif Dagang Hijau (IDH)	Pendekatan Produksi, Perlindungan, dan Inklusi ( <i>Produce, Protect, and Include/ PPI</i> )	IDH menghimpun pelaku usaha, pemerintah, petani, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun model tata kelola berkelanjutan di wilayah penghasil komoditas ataupun lanskap lainnya. Melalui pendekatan PPI, IDH mewujudkan kawasan yang memproduksi hasil pertanian secara berkelanjutan (Produksi), melindungi hutan dan sumber daya alam (Perlindungan), dan memberdayakan masyarakat (Pelibatan Sosial). Pendekatan PPI dilakukan melalui sejumlah intervensi utama, yaitu: perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, kesepakatan PPI, tata kelola lanskap, dan membangun hubungan dengan pasar. IDH bertujuan untuk melindungi dan memulihkan 5 juta ha lanskap yang rentan pada tahun 2030 melalui pendekatan PPI.	Menerapkan pendekatan PPI di 22 lanskap di 13 negara. IDH telah membuat platform <a href="#">SourceUp</a> untuk menghubungkan koalisi lanskap dengan pasar dan membantu meningkatkannya.	Sektor swasta merupakan mitra utama IDH dalam pendekatan PPI.
IUCN	<i>Sustainability and Inclusion Strategy for Growth Corridors in Africa</i> (SUSTAIN-Africa) dan SUSTAIN Pro	SUSTAIN-Africa merupakan inisiatif 10 tahun yang dipelopori IUCN dan dimulai pada tahun 2014. Inisiatif ini dicetuskan untuk melaksanakan pembangunan lanskap berketahanan iklim di Tanzania dan Mozambik. Pada akhirnya, inisiatif ini diharapkan mampu mendorong Afrika untuk beralih dari praktik dan pendekatan konvensional (BAU) ke jalur ekonomi yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan ekosistem dan kemakmuran sosial. Fokus utama inisiatif ini adalah air bersih dan keamanan pasokan air. Pada bulan Februari 2022, IUCN mencanangkan SUSTAIN Pro, sebuah inisiatif 10 tahun lainnya yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan dalam aspek mata pencaharian, degradasi ekosistem, dan tantangan pertanian dalam koridor utama pertumbuhan ekonomi di Tanzania dan Mozambik.	Lihat <a href="#">di sini</a> untuk laporan perkembangan SUSTAIN-Africa.	Sektor swasta merupakan pemangku kepentingan yang relevan untuk SUSTAIN dan SUSTAIN Pro.
Persatuan Organisasi Penelitian Hutan Internasional ( <i>International Union of Forest Research Organizations/IUFRO</i> )	Gugus Tugas dalam Transformasi Lanskap Hutan ( <i>Task Force on Transforming Forest Landscapes</i> )	Gugus Tugas ini berupaya menyediakan dasar ilmiah untuk melakukan transformasi lanskap hutan menjadi sistem pemanfaatan lahan yang berketahanan iklim dan memenuhi seluruh spektrum kebutuhan jasa ekosistem bagi masyarakat saat ini dan masyarakat di masa mendatang. Upaya ini mencakup kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan para profesional dan pemangku kepentingan setempat berikut ini: merancang skenario dan proyeksi pembangunan lanskap hutan pada masa mendatang berdasarkan skenario perubahan iklim dan berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di dunia; menjajaki pendekatan praktik terbaik yang mencakup dimensi sosial-politik, ekologi, dan ekonomi dari transisi lanskap; dan mengembangkan materi penyuluhan dan edukasi lanskap hutan yang sesuai beserta skema Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dapat diimplementasikan di lapangan, dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pemangku kepentingan.	Tiga area tematik: (1) analisis dan proyeksi skenario, (2) pendekatan praktik terbaik untuk pelestarian, restorasi, dan pengelolaan adaptif lanskap hutan, dan (3) program penjangkauan dan edukasi mengenai lanskap hutan. Untuk mengakses publikasinya, lihat <a href="#">di sini</a> .	Uraian tentang topik-topik penelitian dan pengembangan tertentu untuk sektor swasta
Rainforest Alliance, Verra, dan Conservation International	Landscape	Digagas pada tahun 2019, LandScale merupakan upaya kolaboratif untuk mendorong peningkatan berskala besar dengan menyediakan informasi yang andal tentang keberlanjutan lanskap yang tersedia secara luas bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini, LandScale menawarkan pendekatan terpadu untuk menilai indikator kinerja lanskap melalui platform digital. LandScale dirancang untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menghubungkan para pemangku kepentingan lanskap dengan berbagai inisiatif lanskap. Selain itu, LandScale menawarkan validasi klaim yang dapat dibuat oleh para pemangku kepentingan atas tonggak capaian penilaian, kinerja lanskap, dan kontribusinya terhadap kinerja lanskap.	LandScale menyajikan berbagai hasil dari 17 penilaian tingkat lanskap.	Ditujukan untuk mendorong sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi yang dapat diandalkan mengenai keberlanjutan lanskap.
CIFOR & ICRAF	Inisiatif Kolaborasi untuk Operasionalisasi Pendekatan Lanskap untuk Alam, Pembangunan, dan Keberlanjutan ( <i>Collaborating to Operationalise Landscape Approaches for Nature, Development and Sustainability/ COLANDS</i> )	Sejak tahun 2018, organisasi penelitian CIFOR menerapkan pendekatan lanskap selama lima tahun sebagai bagian dari inisiatif COLANDS di tiga negara tropis, yaitu Indonesia, Burkina Faso, dan Zambia. Dalam penelitian ini, CIFOR menggunakan pendekatan lanskap untuk menghadapi tantangan dalam masyarakat di negara-negara tersebut dan mengamati proses pelaksanaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap pendekatan tersebut. Selain itu, CIFOR turut berkontribusi dalam penelitian ilmiah mengenai pendekatan lanskap.	CIFOR <a href="#">menyampaikan hasil temuan</a> inisiatif COLANDS.	

Pemangku Kepentingan	Nama Inisiatif	Pelaksanaan PL/PY	Kemajuan hingga saat ini	Pelibatan sektor swasta
WWF (Dibiayai dari tahun 2016-2019 oleh Climate KIC dan Institut Inovasi dan Teknologi Eropa/ European Institute of Innovation and Technology)	<i>Landscape Finance Lab</i>	Landscape Finance Lab bertujuan untuk bersama-sama menciptakan lanskap berkelanjutan dengan mendukung para praktisi lanskap dalam melakukan pelingkupan, penataan, perancangan, dan pendanaan pendekatan lanskap. Tujuan lainnya adalah mendorong inovasi pembiayaan melalui penataan portofolio investasi lanskap dan sarana investasi melalui kerja sama dengan para investor, serta melakukan pengembangan kemampuan bagi para investor dan pengelola lahan dalam pendekatan lanskap.	Beberapa hasil yang telah dicapai, di antaranya adalah pengembangan proyek lanskap berkelanjutan layak investasi senilai 1 miliar dolar di 15 negara.	Menyediakan layanan untuk sektor keuangan dan menghubungkan sektor keuangan dengan berbagai proyek lanskap.
<i>Global Landscapes Forum (GLF)</i>		GLF didedikasikan untuk pendekatan lanskap dan bertujuan mempercepat gerakan untuk pendekatan tersebut. GLF menjembatani hubungan lintas sektor dan berbagai skala. Forum ini menyediakan wadah bagi beragam aspirasi yang sering kali terabaikan dari masyarakat di seluruh dunia, terutama bagi kelompok perempuan, generasi muda, serta masyarakat perdesaan, masyarakat adat, dan masyarakat setempat. Lima topik tematik dalam upaya GLF meliputi restorasi, keuangan, hak, pangan dan mata pencaharian, serta pengukuran perkembangan.	Sejak tahun 2013, GLF telah menghubungkan lebih dari 7000 organisasi dalam jaringannya, melibatkan 185 negara dalam berbagai kegiatan dan acara yang digelar, dan menjangkau lebih dari satu miliar orang melalui media.	Sektor swasta merupakan pusat kegiatan penjangkauan dan berjejaring bagi GLF.
Earth innovation Institute	<b>Basis Data Yurisdiksi Hijau (<i>Green Jurisdictions Database</i>)</b>	Green Jurisdictions Database (GJD) mengumpulkan data yang tersedia mengenai hutan, emisi karbon, produksi pertanian, serta indikator sosial, kebijakan, dan program untuk membantu negara bagian dan provinsi di wilayah hutan tropis yang bermaksud menerapkan JA. GJD memungkinkan dilakukannya analisis terhadap berbagai indikator, termasuk produksi pertanian, peternakan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta tata kelola di tingkat daerah.	GJD menyediakan data mengenai hutan dan pembangunan berkelanjutan di 55 kawasan hutan tropis.	Selain untuk pemerintah daerah, basis data ini juga ditujukan untuk membantu para investor dan pembeli komoditas, serta pembeli kredit karbon hutan dalam melakukan pengambilan keputusan.
Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum)	<b>Jaringan Aksi Yurisdiksi – Pusat Sumber Daya JA (<i>Tropical Forest Alliance/TFA</i>)</b>	Platform ini memfasilitasi berbagai organisasi yang ingin mendorong Pendekatan Yurisdiksi dalam mendukung produksi dan pengadaan komoditas yang berisiko terhadap hutan secara bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman para mitra TFA, memperkuat upaya yang sedang berlangsung, mengangkat beragam kisah sukses, dan menjajaki berbagai persoalan lintas sektor di berbagai inisiatif yurisdiksi. Secara khusus, program ini bertujuan mendorong dan menggerakkan sektor swasta untuk mengambil tindakan bersama sehingga dapat membangun momentum di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan negara bagian yang berupaya mencapai keberlanjutan.	Platform ini menyediakan <a href="#">beberapa alat</a> untuk para pemangku kepentingan, termasuk panduan mengenai langkah praktis yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendukung inisiatif yurisdiksi ataupun pemikiran kritis mengenai cara dan alasan inisiatif yurisdiksi ini mampu menghasilkan progres yang terukur.	Kemitraan dan platform berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan yang jelas untuk memfasilitasi tindakan sektor swasta.
<b>EcoAgricultural Partners</b> (dipelopori bersama oleh <i>Rainforest Alliance, Conservation International, UNDP, Landscape Finance Lab, dan Tech Matters</i> )	<b>1000 Landscapes for 1 billion People</b>	The initiative aims to provide substantive capacity-building, network facilitation, and finance solutions to fulfil the objective of delivering landscape solutions across 1,000 landscapes for 1 billion people. Inisiatif ini berupaya menyediakan sarana pengembangan kemampuan, fasilitasi jaringan, dan solusi keuangan yang substantif untuk mencapai tujuan mewujudkan solusi lanskap di 1000 kawasan untuk satu miliar orang pada tahun 2030.		Inisiatif ini ditujukan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama lembaga keuangan swasta.
ISEAL	<b>Panduan praktis untuk aksi perusahaan dalam pendekatan lanskap dan yurisdiksi (<i>Effective company actions in landscapes and jurisdictions: guiding practices</i>)</b>	ISEAL bertujuan memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan yang dinyatakan oleh pemerintah di berbagai yurisdiksi, inisiatif lanskap, dan perusahaan yang mendapatkan sumber daya dari ataupun mendukung keduanya.	ISEAL telah menyusun sejumlah panduan praktik untuk mengarahkan perusahaan agar dapat mendukung dan berinvestasi dalam PL/PY serta mengklaim kontribusinya secara transparan dan kredibel.	Target sasaran ISEAL adalah sektor swasta.
<b>Sustainable Agriculture Network (SAN)</b>	<b>Blueprint for Sustainable Landscapes; TerraViva,</b>	SAN adalah jaringan kolaboratif organisasi global. Salah satu tujuan SAN adalah mengembangkan sejumlah alat praktis untuk berbagai tingkatan guna mendorong peningkatan keberlanjutan jangka panjang di seluruh lanskap. Alat yang direncanakan ini akan berfungsi sebagai 'cetak biru' untuk mencapai keberlanjutan di wilayah tertentu, yang menyajikan penilaian andal dan terpercaya mengenai kontribusi sektor perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya saat ini terhadap tujuan tersebut, serta merampingkan dan meningkatkan kinerja sistem standar dan sistem lainnya yang sudah ada di wilayah bersangkutan. Alat ini juga akan membantu pengembangan berbagai jalur yang dapat digunakan petani untuk meningkatkan praktiknya, dan memfasilitasi lembaga keuangan dalam merancang sarana investasi yang lebih baik guna mendukung upaya ini.	Blueprint for Sustainable Landscapes saat ini sedang diuji coba di Kolombia. Selain itu, SAN baru-baru ini memulai tahap percontohan TerraViva, sebuah pendekatan pengelolaan lanskap yang digerakkan oleh masyarakat.	
Global Forest Watch	<b>Pendekatan Komoditas/ Yurisdiksi (<i>The Commodities/ Jurisdiction Approach</i>)</b>	Pendekatan ini bertujuan menyatukan komitmen perusahaan dalam mengurangi deforestasi di rantai pasok melalui berbagai program pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca di tingkat nasional dan daerah dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya dari sektor publik dan swasta. Untuk melaksanakannya, inisiatif ini meminta para ahli independen menilai berbagai program di tingkat nasional dan daerah untuk mengetahui keselarasannya dengan sejumlah kriteria yang ditetapkan perusahaan pemasok komoditas untuk pembelian komoditas yang diprioritaskan.	Tidak tentu	Penyedia layanan langsung ke perusahaan, menggunakan perspektif perusahaan mengenai gambaran PL/PY yang semestinya.
<b>Accountability Framework Initiative (AFI)</b>		AFI merupakan upaya kolaboratif untuk membangun dan meningkatkan rantai pasok yang etis untuk hasil pertanian dan kehutanan dengan mengembangkan berbagai prinsip panduan.	Core Principal 10 mengenai kolaborasi untuk keberlanjutan lanskap dan sektoral. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus berkontribusi terhadap inisiatif lanskap, yurisdiksi, dan sektoral untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan utama yang berkaitan dengan operasi dan rantai pasoknya.	Panduan untuk sektor swasta

## Penulis

### Frederik Buchholz

Senior Global Policy Officer,  
Forests

---

### Penulis Studi Kasus Regional Indonesia

#### Nur Arifiandi

Regional Lead, Policy and Regulations,  
Forests, CDP SEA&OC

#### Devyandra Putri

Senior Policy and Public Affair Officer,  
CDP SEA&OC

---

### Penulis Studi Kasus Regional Brasil

#### Francisco Gandolfi de Tulio

Policy & Forests Analyst,  
CDP Latin America

#### Maria Clara Nascimento

CSTAR Coordinator,  
CDP Latin America

## Ucapan terima kasih

Thomas Maddox

Helen Finlay

Claire Prescott

Norma Mercedes Pedroza Arceo

Miriam Garcia

Andre Socrates

Raíssa Saré

Rebeca Rocha

---

## Ungkapan terima kasih khusus untuk:

Hugo Rosa da Conceicao

Supported by: **Walmart Foundation**

**Walmart**  **org**

Kajian dalam laporan ini dilaksanakan atas dukungan pendanaan dari *The Walmart Foundation*. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini adalah milik penerima hibah itu sendiri dan tidak mencerminkan pendapat *The Walmart Foundation*.

## Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba global yang menjalankan sistem pengungkapan lingkungan hidup di dunia untuk perusahaan, kota, negara bagian, dan wilayah. Didirikan pada tahun 2000 dan bekerja sama dengan lebih dari 740 lembaga keuangan dengan aset lebih dari \$136 triliun, CDP memelopori penggunaan pasar modal dan pengadaan korporat untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, serta mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga sumber daya air, dan melindungi hutan. Lebih dari 24.000 organisasi di seluruh dunia mengungkapkan data melalui CDP pada tahun 2023, termasuk lebih dari 23.000 perusahaan yang bernilai setengah dari kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 1.100 kota, negara bagian, dan wilayah. Selaras dengan TCFD, CDP memiliki basis data lingkungan terbesar di dunia, dan skor CDP digunakan secara luas untuk mendorong keputusan investasi dan pengadaan menuju ekonomi tanpa karbon, berkelanjutan, dan tangguh. CDP adalah anggota pendiri inisiatif Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, dan inisiatif Net Zero Asset Managers. Kunjungi [cdp.net](https://cdp.net) atau ikuti kami di @CDP untuk mengetahui lebih lanjut.